

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, sebagaimana telah menjadi tugas pokok, fungsi dan wewenang Badan Pendapatan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk:

- (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan;
- (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka memujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026 dan Renstra (Rencana Strategis) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.

Dari semua program dan kegiatan, yang menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah adalah Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah. Terlepas dari masih adanya kelemahan, kekurangan serta hambatan, namun kiranya semoga Laporan ini dapat menjadi representasi dari Kinerja Badan Pendapatan Daerah selama Tahun 2023, yang mana pada tahun mendatang akan terus berupaya untuk ditingkatkan.

Tana Paser, 01 Maret 2024



Kepala Badan

Ali Nour Muhamad, .SP.,MM

NIP. 19730903 200604 1 012



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah merupakan implementasi program-program guna mencapai Tujuan dan Sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Visi Pemerintah Kabupaten Paser adalah “**MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA**”

Ditinjau dari Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah keterkaitan langsung mengemban Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **Misi ke-2 yaitu : ” : Meningkatkan Tata Kelola Permerintahan Yang Efektif Dan Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan”**.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan. Tujuan dan Sasaran tersebut tertuang dalam Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser.

Dalam hal Meningkatkan Potensi Pajak Daerah yang dijadikan Indikator Kinerja Utama oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu kontribusi pendapatan asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah artinya bahwa angka yang nantinya dijadikan nilai dalam IKU adalah angka yang diberikan BAPENDA hanya dari realisasi pendapatan Asli Daerahnya saja sebagai fungsi Eksekutor dibagi Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dikali 100%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tujuan Strategis	sasaran strategis	IKU	Target	realisasi	Capaian	Program Teknis	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	3	4				8	9	10
*Meningkatkan pendapatan daerah dari Sektor PAD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	Rp 97.957.000.000	Rp 66.060.339.438,10	67,44%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
		Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	Rp 10.950.974.500	Rp 11.346.411.616	103,61%			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Rp 6.291.746.565	Rp 6.291.746.565	100,00%			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	Rp 222.430.576.028	Rp 108.252.998.780	48,67%			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
							Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
							Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
							Penetapan Wajib Pajak Daerah	
							Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
							Penagihan Pajak Daerah	
							Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP dari APIP	A	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	
	Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
					Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Kordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

							Penyediaan Perabtan dan Perengkapan Kantor
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
						Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gdng Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara menyeluruh Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 66.058.739.438.10 atau 67.69% dari target sebesar Rp. 97.597.000.000,- dimana realisasi Pajak Daerah ini mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 28.157.701.944,6 atau 74,29% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang sebesar Rp. 37.901.037.493,84 dimana pertumbuhan ini dialami oleh hampir semua jenis Pajak Daerah terutama terjadi pada BPHTB yang mengalami pertumbuhan sebesar 322,58%.

Dapat dijabarkan bahwa anggaran atau keuangan pada tahun 2023 yang mendukung terhadap Perjanjian Kinerja Kepala Badan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp. 6.838.400.454 terealisasi sebesar Rp. 6.475.625.663 atau 83.50 %, anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 13.375.151.510 terealisasi sebesar Rp. 10.832.931.555 dengan capaian 80.99% dengan keseluruhan anggaran sebesar Rp. 20.213.552.064

Tingkat keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) sekaligus sebagai Indikator Kinerja Wajib Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten paser serta Renstra Badan, dapat disimpulkan hasil penilaian dari semua indikator capaian kinerja di atas target. Di dalam analisis diuraikan mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat untuk semua kegiatan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor pendorong dan faktor penghambat bisa berasal dari internal dan eksternal yang menyangkut sumber daya, baik karyawan maupun masyarakat, dana dan sarana/prasarana untuk kegiatan operasional Badan.

Faktor-faktor penghambat yang berkaitan dengan tugas Badan Pendapatan Daerah, diantaranya :

- a. Jumlah sumber daya aparatur belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
- b. Sarana prasarana penunjang pelayanan pajak daerah dan pelayanan administrasi belum optimal;
- c. Kurangnya pemahaman dalam optimalisasi perencanaan, pengendalian dan operasional pajak daerah;

- d. Belum optimalnya sistem pengendalian intern dalam pendapatan daerah;
- e. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- f. Belum optimalnya penerimaan pajak daerah;
- g. Belum optimalnya data potensi pajak daerah yang dimiliki;
- h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasangan alat perekam data transaksi (billing cheker/tapping box);
- i. Rendahnya kesadaran wajib pajak;

Faktor-faktor pendorong yang berkaitan dengan tugas Badan Pendapatan Daerah, diantaranya

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi untuk mengoptimalkan kontribusi Pajak Daerah;
3. Adanya komitmen pimpinan untuk mengoptimalkan kontribusi Pajak Daerah;
4. Adanya sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor, kendaraan dinas yang cukup memadai;
5. Adanya pelaksanaan bimbingan teknis pajak daerah untuk pegawai.

Tana Paser, 1 Maret 2024

Kepala Badan



(Signature)
Ali Nour, Muhamad, SE

NIP 19730903 200604 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN JINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
BAB IV PENUTUP	77
Lampiran I : Form Perjanjian Kinerja	
Lampiran II : Form Pengukuran Kinerja	
Lampiran III : Form Rencana Aksi	
Lampiran IV : Form Hasil evaluasi Kinerja per semester	
Lampiran V :	
- SOP Penyusunan Laporan Kinerja	
- Pedoman pengumpulan data kinerkja	
- SK tim Penyusun Laporan Kinerja	

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mem pertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

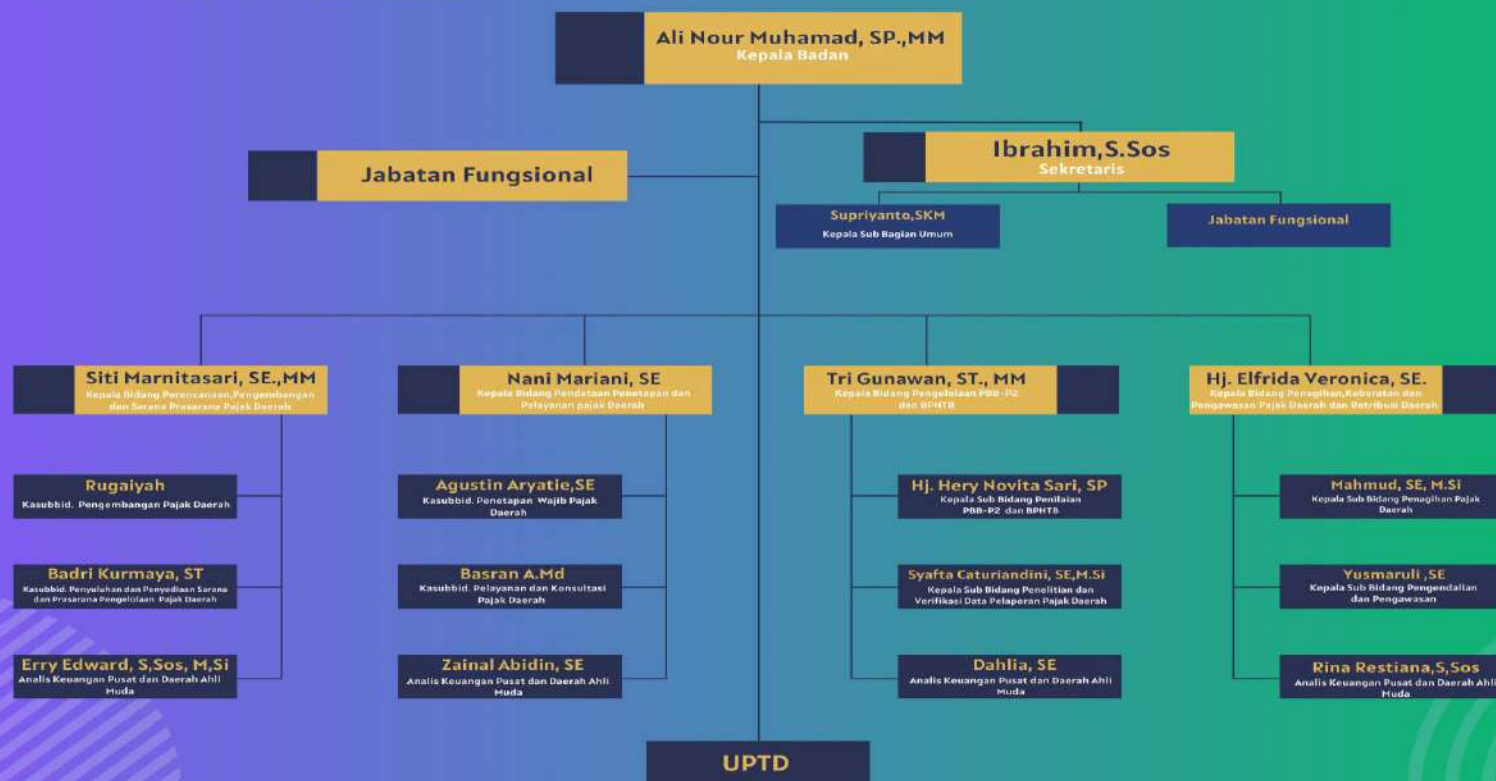
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Paser tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai Berikut



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Struktur Organisasi 2023 No.27 Tahun 2023



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pendataan, pendaftaran dan penetapan, perhitungan penagihan dan keberatan serta dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah dengan rencana strategis pemerintahan daerah;
 - b. Penetapan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian, pendataan, pendaftaran dan penetapan, perhitungan, penagihan dan keberatan serta dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi perangkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser terdiri dari :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
2. Sekretariat, Membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum

- b. Jabatan Fungsional
3. Bidang Perencanaan ,Pengembangan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah ,Membawahkan
 - a. Subbidang Pengembangan Pajak Daerah;
 - b. Subbidang Penyuluhan dan Penyediaan sarana dan prasarana pengelollan pajak daerah ;dan
 - c. Jabatan Fungsional
4. Bidang Pendataan ,Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah membawahkan;
 - a. Sub Bidang Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;dan
 - c. Jabatan Fungsional
5. Bidang Penagihan ,Keberatan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,membawahkan;
 - a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan ; dan
 - c. Jabatan Fungsional
6. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB P2;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bapenda tahun 2023 didukung dengan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pendukung :

Pendidikan	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jumlah
Eselon II						1	1
Eselon III					3	2	5
Eselon IV			1	1	8	5	15
Staf PNS			7	0	16	0	23

ISU STRATEGIS

Dalam menentukan isu – isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Berikut beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Paser :

- a. Wajib pajak belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran
- b. Kurangnya Pemahaman terhadap tugas dan fungsi aparatur sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah;
- c. Belum ditetapkannya beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan
- d. pendapatan berupa Peraturan Bupati (Perbup) dan Standar Operasional

Prosedur (SOP), sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal;

- e. Kurangnya sarana dan prasarana kantor, serta peralatan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- f. Belum dilaksanakan sistem dan prosedur secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan PAD;
- g. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan PAD;
- h. Belum diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan PAD;
- i. Belum adanya verifikasi data piutang PBB sektor perkotaan hasil peralihan dari KPP Pratama Penajam Balikpapan ke Badan Pendapatan Daerah;
- j. Terbatasnya anggaran yang tersedia guna menunjang optimalisasi PAD;

KABUPATEN PASER

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

a. Visi

Bertitik tolak dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2022-2026), yaitu:

“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”

Yang dimaksud dengan ***MENUJU KABUPATEN PASER MAJU*** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan ***MENUJU KABUPATEN PASER ADIL*** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa:

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2022- 2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Covid 19 telah membuat arus barang dan jasa terhambat. Salah satu dampak terbesar dari terhambatnya arus barang itu adalah kelangkaan pangan. Sebagai daerah yang belum cukup mampu menghasilkan pangan secara mandiri, maka saatnya Paser untuk memperkuat

Pengembangan pertanian maupun industri pengolahan menuju pada kebutuhan pemenuhan pangan. Desain apapun yang diimplementasikan nantinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal juga meningkatkan daya saing dengan daerah sekitar. Desain ini akan akan menciptakan nilai tambah dan multiplier di Kabupaten Paser yang akan membawa pada kesejahteraan pelaku usaha, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi

Stimulan ekonomi diarahkan pemerintah dengan memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil menengah dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi dan mendorong ekonomi tetap terjaga.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional partisipatif dan transparan

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Covid 19 telah membuat arus barang dan jasa terhambat. Salah satu dampak terbesar dari terhambatnya arus barang itu adalah kelangkaan pangan. Sebagai daerah yang belum cukup mampu menghasilkan pangan secara mandiri, maka saatnya Paser untuk memperkuat pengembangan pertanian maupun industri pengolahan menuju pada kebutuhan pemenuhan pangan. Desain apapun yang diimplementasikan nantinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal juga meningkatkan daya saing dengan daerah sekitar. Desain ini akan akan menciptakan nilai tambah dan multiplier di Kabupaten Paser yang akan membawa pada kesejahteraan pelaku usaha, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi.

Stimulan ekonomi diarahkan pemerintah dengan memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil menengah dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga

konsumsi dan mendorong ekonomi tetap terjamin.

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan

Arah dari Misi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial

2. Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD 2021-2026 tersebut dan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan khususnya urusan keuangan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mengambil peran pada :

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan

Efisien Melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif Dan Transparan

Responsif Dan Tangkas, dengan sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Sasaran2.1 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Yang meliputi urusan Sekretariat Daerah, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, pengawasan, kearsipan, statistik, persandian, sekretariat DPRD, kecamatan

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misidan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan yang akan dicapai:

- Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PAD
- Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Responsif dan Tangkas

3. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

- a. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser dalam melaksanakan fungsinya melakukan kebijakan yaitu:

1. Peningkatan pendataan potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pengelolaan lain-lain PAD yang sah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Tabel T C - 26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- VISI : MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA
- MISI 2 (RPJMD) : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang professional, partisipatif dan transparan
- Tujuan 2 (RPJMD) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas
- Sasaran 2.1 (RPJMD) : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Yang meliputi urusan Sekretariat Daerah, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pengawasan, Kearsipan, Statistik, Persandian, Sekretariat DPRD, Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PAD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Peningkatan pendataan potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pengelolaan lain-lain PAD yang sah

Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Responsif dan Tangkas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
--	--	--	---



Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase tingkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan/APBD	7%	7%	8%	9%	10%	10%	10%
Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	12%	12%	13%	14%	15%	15%	15%
Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	4%	4%	5%	6%	7%	8%	8%
Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	4%	4%	5%	6%	7%	8%	8%
Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	8%	8%	9%	10%	11%	12%	12%
Rasio PAD terhadap APBD	7.34%	7.5%	7.7%	8%	8.3%	8.5%	8.5%
Presentase Peningkatan PAD	9%	9%	10%	12%	15%	15%	15%
Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5

Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	10 Kecamatan	10	10	10	10	10	10	10
Jumlah Sarana dan Prasarana Pajak Daerah	4 Aplikasi	4	4	5	5	6	6	6
Jumlah Objek Pajak yang Didata	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
Jumlah PBB dan BPHTB yang diverifikasi	86222 WP PB 1302 WPBPHTB	86800 WP PB 1340 WPBPHTB	87000 WP PB 1400 WP BPHTB	87200 WP PBB 1480 WPBPHTB	87400 WP PB 1500 WPBPHTB	87600 WP PB 1550 WP BPHTB	87600 WP PB 1550 WP BPHTB	87600 WP PB 1550 WP BPHTB
Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	1571 WP	1590	1610	1640	1670	1700	1700	8210
Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1	5

Jumlah Tunggakan Pajak Daerah yang diselesaikan								
Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	49 Kasus	41	35	27	20	12	12	
Dokumen Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	
Dokumen Laporan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	
Persentase peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah	NA	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	CC	B	B	BB	A	A	A	
Jumlah Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	N/A	0	0	0	0	0	0	
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	N/A	70	72	74	76	80	80	

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	6	6	6	6	6	6
Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Dokumen	2	2	2	2	2	2
Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1
Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	1	1	1	1	1	1
Dokumen Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	2	2	2	2	2	2
Presentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1	1	1	1	1	5
Dokumen Pelaksanaan Akutansi	1 Dokumen	1	1	1	1	1	5

Presentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	10 Orang	10	10	10	10	10	50
Presentase Peningkatan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
Tersedianya komponen instalasi Listrik	10 Jenis	10	10	10	10	10	10
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit	15	15	15	15	15	75
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1	1	1	1	1	5
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Gedung Kantor, Alat Tulis Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 Jenis	10	10	10	10	10	10

Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	20	20	20	20	20	20	20
Tersedianya Koan dan Peraturan Perundang-undangan	365 Exemplar	365	365	365	365	365	365	1825
Jumlah Raat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	30 kali Rapat Koordinasi	30	30	35	35	40	40	40
Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	1604 Berkas	1700	1700	1800	1850	1850	1850	1850
Presentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Benda Pos	60 Lembar	60	60	60	60	60	60	300
Tersedianya Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12
Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tersedianya Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	5	5	5	5	5	5
Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	1 Paket	1	1	1	1	1	1
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	1	1	1	1	1	1



1. Indikator Kinerja sasaran dan target capaiannya

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, bahwa Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator utama di lingkungannya masing-masing dengan tujuan (Lampiran)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	12%	13%	14%	15%	15%
	Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	4%	5%	6%	7%	8%
	Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4%	5%	6%	7%	8%
	Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	8%	9%	10%	11%	12%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	B	B	BB	A	A
	Jumlah Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0

2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran perlu adanya program dan kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu

tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kegiatan sebagai penjabaran dari program, juga diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



MATRIK KETERKAITAN ANTARA TUJUAN STRATEGIS ,SASARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA ,CAPAIAN KINERJA ,PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2023

No	Tujuan Strategis	sasaran strategis	IKU	Target	realisasi	Capaian	Program Teknis	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4				8	9	10
1	•Meningkatkan pendapatan daerah dari	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	Rp 97.957.000.000	Rp66.060.339.438,10	67,44%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah



Sektor PAD	daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	Rp 10.950.974.500	Rp 11.346.411.616	103,61%			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Rp 6.291.746.565	Rp 6.291.746.565	100,00%			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	Rp 222.430.576.028	Rp 108.252.998.780	48,67%			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

										Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
										Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
										Penetapan Wajib Pajak Daerah
										Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
										Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
										Penagihan Pajak Daerah
										Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
								Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP dari APIP	A	BB		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		
		Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
							Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

								han Daerah	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gdng Kantor atau Bangunan Lainnya



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Nama Unit Kerja :Badan Pendapatan Daerah
2. Tugas :Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan.
3. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara Bupati dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser untuk mewujudkan target kinerja tertentu yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi. Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 antara Bupati dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tertera dalam (Lampiran)



NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	$\frac{\Sigma \text{Penerimaan Pjk Daerah (tahun n)} - \Sigma \text{Penerimaan Pajak Daerah (tahun n-1)}}{\Sigma \text{Penerimaan Pjk Daerah (tahun n-1)}} \times 100\%$ <p>Definisi operasional Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak PBB-P2, Pajak BPHTB-P2, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak penerangan jalan</p>
		Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	$\frac{\Sigma \text{Penerimaan Retribusi (tahun n)} - \Sigma \text{Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah (tahun n-1)}}{\Sigma \text{Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah (tahun n-1)}} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional Retribusi daerah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu</p>
		Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	<p>Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (By. Simda Keuangan)</p> <p>Definisi Operasional: Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antra lain dari BPD, Perusahaan Daerah, Deviden BPR-BKK dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga (dalam Rupiah)</p>
		Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	$\frac{\Sigma \text{Pembayaran WP Aset Daerah}}{\Sigma \text{WP Aset Daerah}} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional: penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah lain yang sah diantaranya: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro, pendapatan bunga; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.</p>
		Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penilaian berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>Definisi Operasional: IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah. Disamping itu melalui data indeks kepuasan masyarakat dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.</p>
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP dari APIP	<p>Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP</p> <p>Definisi Operasional Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. Capaian Kinerja SKPD

1. Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.

Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Beberapa kriteria dapat digunakan sebagai syarat indicator kinerja yang baik. Ada 5 (lima) kriteria sebagai referensi untuk menentukan kualitas suatu indikator kinerja Specific, Measureable, Attainable, Realistic dan Timely (SMART).

Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut:

a. Input

Indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

b. Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

c. Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan

untuk menghasilkan output dan outcome

d. Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan:

- 1) Peningkatan kuantitas setelah kegiatan selesai,
- 2) Perbaikan proses setelah kegiatan selesai,
- 3) Peningkatan efisiensi setelah kegiatan selesai,
- 4) Peningkatan kualitas setelah kegiatan selesai.

Dalam pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser diupayakan Indikator menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser secara keseluruhan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$$

- **Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah**

Pada sasaran diatas pendapatan asli daerah berdasarkan dari pajak daerah , retribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Dari gabungan tersebut , dapat di hitung persentase tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{tingkat penerimaan PAD} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \\
 &= \frac{191.951.496.398,58}{336.970.037.093} \times 100\% \\
 &= 56,96
 \end{aligned}$$

Indikator Sasaran	tahun 2022		tahun 2023		Persentase	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	Rp 170.969.275.185,84	Rp 162.734.601.552,66	Rp 336.970.037.093	Rp 191.951.496.398,93	95,18%	56,96%



PERSENTASE PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2022-2023

Indikator Sasaran	tahun 2022		tahun 2023		Persentase	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	Rp 170.969.275.185,84	Rp 162.734.601.552,66	Rp 336.970.037.093	Rp 191.951.496.398,93	95,18%	56,96%
Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	Rp 36.717.000.000,00	Rp 37.836.611.347	Rp 97.957.000.000	Rp 66.060.339.438,10	103,05%	67,44%
Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	Rp 11.770.389.000,00	Rp 10.843.759.809	Rp 10.950.974.500	Rp 11.346.411.616	92,13%	103,61%
Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Rp 5.723.822.365,84	Rp 5.723.822.366	Rp 6.291.746.565	Rp 6.291.746.565	100,00%	100,00%
Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	Rp 116.758.063.820,00	Rp 108.330.408.030,93	Rp 222.430.576.028	Rp 108.252.998.780	92,78%	48,67%
Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	78,42%	100%	78,94%	78,42%	78,94%

HASIL DARI KINERJA PAJAK DAERAH

1. PAJAK HOTEL

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp. 745.078.192,- atau 108.77 % dari target sebesar Rp. 685.000.000,- dan mengalami penurunan sebesar Rp. 695.194.224,- bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022 ada wajib pajak yang melakukan pembayaran piutang pajak dengan nilai yang cukup besar sehingga penerimaan tahun tersebut meningkat cukup signifikan

2. PAJAK RESTORAN

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp. 12.652.896.861.70 atau 138.28 % dari target sebesar Rp. 9.150.000.000,- dan mengalami peningkatan sebesar 3.112.730.834,46 bila dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 sebesar 12.652.896.861,70. peningkatan ini disebabkan adanya penambahan objek pajak baru dan meningkatnya omset wajib Pajak Restoran.

3. PAJAK HIBURAN

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp. 15.117.500,- atau 139.31 % dari target sebesar Rp. 12.000.000,- dan mengalami penurunan sebesar Rp. 14.913.500,- bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp. 30.031.000,- hal ini disebabkan menurunnya tingkat kunjungan konsumen ke tempat hiburan sehingga berdampak menurunnya pajak yang disetorkan ke Bapenda.

4. PAJAK REKLAME

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp. 1.022.342.794,- atau 120.28 % dari target sebesar Rp. 850.000.000,- dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 32.181.015,-,- bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 990.161.779,- hal ini disebabkan karena banyaknya penambahan objek pajak baru.

5. PAJAK PENERANGAN JALAN

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp. 13.062.960.609,- atau 108.86 % dari target sebesar Rp. 12.000.000.000,- dan mengalami peningkatan sebesar 1.273.033.328,32 bila dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 sebesar 11.789.927.280,68. peningkatan ini disebabkan meningkatnya setoran pihak PLN karena naiknya tingkat konsumsi tenaga Listrik di Kabupaten Paser yang terus meningkat.

6. PAJAK PARKIR

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2023 sebesar Rp. 191.058.000,- atau 127.37 % dari target sebesar Rp. 150.000.000,- dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 50.419.033,- bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp. 140.638.967,- hal ini disebabkan oleh bertambahnya tempat-tempat parkir sehingga volume kendaraan yang parkir juga semakin meningkat sehingga setoran Pajak Parkir juga meningkat.

7. PAJAK AIR TANAH

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp.71.563.455,80,- atau 143.13 % dari target sebesar Rp. 50.000.000,- dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 18.415.829,86,- bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 53.147.625,94,- hal ini disebabkan karena meningkatnya volume penggunaan air tanah oleh wajib pajak.

8. PAJAK SARANG BURUNG WALET

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 sebesar Rp. 53.597.320,- atau 107.19 % dari target sebesar Rp. 50.000.000,- dan mengalami penurunan sebesar 3.080,- bila dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 sebesar 53.600.400,- penurunan ini disebabkan karena menurunnya produktifitas walet.

9. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebesar Rp. 5.062.556.313,25,- atau 101.25 % dari target sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.693.847.573,75,- bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp. 3.368.708.739,50,- hal ini disebabkan oleh meningkatnya setoran wajib pajak serta banyaknya proyek yang menggunakan mineral bukan logam yang telah menyelesaikan kegiatannya dan menyetorkan pajaknya.

10. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp. 4.201.122.337,- atau 113.54 % dari target sebesar Rp. 3.700.000.000,- dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 564.688.557,52,- bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 3.636.433.779,48,- hal ini disebabkan karena banyaknya penambahan objek pajak baru serta berjalannya program relaksasi pajak yang mendorong wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

11. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp. 28.980.446.055,35,- atau 43,94 % dari target sebesar Rp. 65.950.000.000,- dan mengalami peningkatan sebesar 22.122.496.576,35 bila dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2022 sebesar 6.857.949.479,- peningkatan ini disebabkan adanya 4 perusahaan yang memperoleh HGU pada Tahun 2023 telah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar BPHTB, sedangkan capaian realisasi cukup rendah bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan karena disebabkan pada saat melakukan target perubahan yang awalnya sebesar Rp. 15.846.500.000,- menjadi Rp. 65.950.000.000,- didasarkan pada permohonan BPHTB dari PT. Pradiksi Gunatama. Tbk dengan potensi penerimaan sebesar Rp. 63.608.392.439,-. Pada tanggal 23 Agustus 2023 PT. Pradiksi Gunatama, Tbk mengajukan permohonan pengurangan pembayaran

BPHTB sebesar 50 % dan penghapusan sanksi administrasi, Tanggal 2 Oktober 2023 Bapenda memberikan tanggapan bahwa permohonan tidak dapat diproses, tanggal 3 Oktober 2023 PT. Pradiksi Gunatama, Tbk Kembali mengajukan permohonan pengurangan pembayaran BPHTB dan penghapusan sanksi administrative ke-2, kemudian tanggal 17 Oktober 2023 Kepala Bapenda menerbitkan surat Keputusan menolak permohonan pengurangan BPHTB Pt. Pradiksi Gunatama, Tbk karena waktu wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak dibuat dan ditandatangani akta yaitu tanggal 22 Desember 2022 sedangkan permohonan pengurangan BPHTB tanggal 23 Agustus 2023. Adapun dasar penolakan pengurangan BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 49 Huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 Ayat 2 Huruf b, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 64 Ayat 2 Huruf k, dan Peraturan Bupati Paser Nomor 101 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 5 ayat 2, selanjutnya pada tanggal 7 November 2023 PT. Pradiksi Gunatama, Tbk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser ke Pengadilan Pajak. Menunggu Keputusan dari Pengadilan Pajak maka sampai tanggal 31 Desember 2023 PT. Pradiksi Gunatama, Tbk belum melakukan pembayaran BPHTB sebesar Rp. 63.608.392.439,- sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

2. Persentase Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Capaian retribusi kabupaten paser

$$\begin{aligned}
 \text{tingkat penerimaan Retribusi} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \\
 &= \frac{10.650.714.500}{1} \times 100\% \\
 &= 67.69
 \end{aligned}$$

Indikator Sasaran	tahun 2022		tahun 2023		Persentase	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	Rp 11.770.389.000,00	Rp 10.843.759.809	Rp 10.950.974.500	Rp 11.346.411.616	92,13%	103,61%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi			Persentase (%)	Lebih (Kurang) (Rp)
			s/d Periode Lalu (Rp)	Periode Sekarang (Rp)	s/d Periode Sekarang (Rp)		
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	4.542.526.250,00	5.572.095.640,00	129.391.500,00	5.701.487.140,00	125,51	1.158.960.890,00
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.513.417.250,00	3.432.469.100,00	59.773.500,00	3.492.242.600,00	230,75	1.978.825.350,00
4 . 1 . 2 . 01 . 01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	678.417.250,00	2.528.215.100,00	4.750.500,00	2.532.965.600,00	373,36	1.854.548.350,00
4 . 1 . 2 . 01 . 01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum	135.000.000,00	152.026.000,00	6.230.000,00	158.256.000,00	117,23	23.256.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	700.000.000,00	752.228.000,00	48.793.000,00	801.021.000,00	114,43	101.021.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.400.000.000,00	1.168.441.000,00	7.380.000,00	1.175.821.000,00	83,99	-224.179.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	131.484.000,00	117.104.000,00	0,00	117.104.000,00	89,06	-14.380.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.157.625.000,00	445.275.000,00	45.825.000,00	491.100.000,00	42,42	-666.525.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	5.850.000,00	240.000,00	6.090.000,00	60,90	-3.910.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus	40.000.000,00	46.075.000,00	0,00	46.075.000,00	115,19	6.075.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.000.000,00	55.186.500,00	16.173.000,00	71.359.500,00	178,40	31.359.500,00
4 . 1 . 2 . 01 . 13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	301.695.040,00	0,00	301.695.040,00	120,68	51.695.040,00
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	5.504.688.250,00	4.478.865.868,29	509.797.783,40	4.988.663.651,69	90,63	-516.024.598,31
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.048.000.000,00	830.892.450,00	106.738.950,00	937.631.400,00	89,47	-110.368.600,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	#DIV/0!	15.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	65.000.000,00	93.605.000,00	0,00	93.605.000,00	144,01	28.605.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	133.000.000,00	126.865.400,00	0,00	126.865.400,00	95,39	-6.134.600,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	850.000.000,00	595.422.050,00	106.738.950,00	702.161.000,00	82,61	-147.839.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	3.250.000.000,00	2.937.575.318,29	366.731.333,40	3.304.306.651,69	101,67	54.306.651,69
4 . 1 . 2 . 02 . 02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang yang dikontrakan	1.550.000.000,00	1.507.670.100,00	140.365.500,00	1.648.035.600,00	106,32	98.035.600,00
4 . 1 . 2 . 02 . 02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang di	1.700.000.000,00	1.429.905.218,29	226.365.833,40	1.656.271.051,69	97,43	-43.728.948,31
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	122.708.250,00	102.886.000,00	11.131.000,00	114.017.000,00	92,92	-8.691.250,00
4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	379.700.000,00	313.819.000,00	20.612.000,00	334.431.000,00	88,08	-45.269.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	71.280.000,00	40.462.000,00	2.244.000,00	42.706.000,00	59,91	-28.574.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000,00	128.321.100,00	2.340.500,00	130.661.600,00	43,55	-169.338.400,00
4 . 1 . 2 . 02 . 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga	70.000.000,00	69.467.500,00	0,00	69.467.500,00	99,24	-532.500,00
4 . 1 . 2 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	263.000.000,00	55.442.500,00	0,00	55.442.500,00	21,08	-207.557.500,00
4 . 1 . 2 . 02 . 11.0001	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa bibit dan benih tanaman	163.000.000,00	32.492.500,00	0,00	32.492.500,00	19,93	-130.507.500,00
4 . 1 . 2 . 02 . 11.0003	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 11.0004	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan	30.000.000,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00	76,50	-7.050.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

No.	Nama OPD	sampai dengan bulan lalu		Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	656.260.824,00	101,98	65.173.900,00	25,37	721.434.724,00	243,45
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM	3.780.382.151,69	101,69	456.049.087,00	63,50	4.236.431.238,69	686,69
3	Dinas Kesehatan	1.458.614.400,00	116,97	226.497.000,00	47,45	1.685.111.400,00	535,23
4	Dinas Perhubungan	859.913.600,00	50,23	64.513.000,00	16,10	924.426.600,00	268,20
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	156.575.000,00	125,26	4.250.000,00	7,08	160.825.000,00	251,12
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	728.495.000,00	84,41	241.557.750,00	28,42	970.052.750,00	185,06
7	Dinas Perikanan	22.950.000,00	13,50	20.198.970,00	40,40	43.148.970,00	59,52
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan	44.818.000,00	13,42	87.034.000,00	7,22	48.052.000,00	43,68
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	321.343.040,00	128,54	228.408.000,00	18,27	549.751.040,00	43,98
10	Setda Kab. Paser	168.750.000,00	168,75	13.500.000,00	8,00	182.250.000,00	182,25
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.240.595.000,00	95,43	151.382.500,00	10,70	1.391.977.500,00	101,61
12	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	32.492.500,00	92,84	31.800.000,00	18,17	64.292.500,00	183,69
13	Dinas Pemadam Kebakaran	6.090.000,00	121,80	-	-	6.090.000,00	24,36
14	Kecamatan Pasir Belengkong	4.400.000,00	#DIV/0!	400.000,00	8,33	4.800.000,00	100,00
		9.481.679.515,69		1.590.764.207,00		10.988.643.722,69	

Retribusi perizinan ada 3 yaitu persetujuan bangunan Gedung, penggunaan tenaga kerja asing, pengelolaan pertambahan rakyat. Badan Pendapatan Daerah telah mendata wajib pajak retribusi di wilayah kabupaten paser rinciannya sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Peersetujuan Bangunan Gedung (PBG)	64.705.700,00	9,91	717.939.724,00	143,59
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan umum	468.200,00	15,47	3.495.000,00	99,86
3	Retribusi Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	-	-	-	-
	Jumlah Total	65.173.900,00	25,37	721.434.724,00	243,45

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.353.000,00	13,92	90.069.000,00	150,12
2	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat	3.789.500,00	10,33	75.149.000,00	204,83
3	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	174.687.650,00	11,65	1.822.723.250,00	121,51
4	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	212.518.937,00	12,11	1.868.789.988,69	106,48
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	56.700.000	15,49	379.700.000,00	103,74
	Jumlah Total	456.049.087,00	63,50	4.236.431.238,69	686,69

3. Dinas Kesehatan

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	101.398.000,00	17,57	658.363.900,00	114,09
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	7.152.000,00	10,22	198.118.500,00	283,03
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	117.947.000,00	19,66	828.629.000,00	138,10
	Jumlah Total	226.497.000,00	47,45	1.685.111.400,00	535,23

4. Dinas Perhubungan

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	-	0,00	106.984.000,00	81,37
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	46.250.000,00	4,00	498.552.000,00	43,07
3	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	12.997.000,00	10,59	121.110.965,00	98,70
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4.531.000,00	1,51	135.192.600,00	45,06
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	735.000,00		62.587.035,00	

5. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah		0,00	132.005.000,00	203,08
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.250.000,00	7,08	28.820.000,00	48,03
	Jumlah Total	4.250.000,00	7,08	160.825.000,00	251,12

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.234.000,00	7,22	48.052.000,00	43,68
2	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	83.800.000,00		-	
	Jumlah Total	87.034.000,00	7,22	48.052.000,00	43,68

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Penyewaan Bangunan		0	9.365.400,00	72,04
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	241.557.750,00	28,42	960.687.350,00	113,02
	Jumlah Total	241.557.750,00	28,4186	970.052.750,00	185,06

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	228.408.000,00	91,36	549.751.040,00	219,90
	Jumlah Total	228.408.000,00	18,27	549.751.040,00	43,98

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	13.500.000,00	8,00	182.250.000,00	182,25
	Jumlah Total	13.500.000,00	8,00	182.250.000,00	182,25

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	139.045.000,00	10,70	1.320.990.000,00	101,61
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus			60.962.500,00	
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			10.025.000,00	
	Jumlah Total	151.382.500,00	10,70	1.391.977.500,00	101,61

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

2.

1	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	31.800.000,00	90,86	64.292.500,00	183,69
	Jumlah Total	31.800.000,00	18,1714	64.292.500,00	183,69

13. Pemadam Kebakaran

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	-	-	6.090.000,00	121,80
	Jumlah Total	-	-	6.090.000,00	24,36

Kecamatan Paser Belengkong

No.	Jenis Retribusi	Realisasi Bulan Desember		sampai dengan bulan ini	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.000,00	8,33	4.800.000,00	100,00
	Jumlah Total	400.000,00	8,33	4.800.000,00	100,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden. Realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

tingkat penerimaan Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \\
 &= \frac{6.291.746.564,82}{6.291.746.565} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Indikator Sasaran	tahun 2022		tahun 2023		Persentase	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Rp 5.723.822.365,84	Rp 5.723.822.366	Rp 6.291.746.565	Rp 6.291.746.565	100,00%	100,00%

4. lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- Hasil kerjasama daerah
- Jasa giro
- Hasil pengelolaan dana bergulir
- Pendapatan bunga
- Penerimaan atas tuntutan gati kerugian keuangan daerah
- Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
- Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- Pendapatan denda pajak daerah
- Pendapatan denda retribusi daerah
- Pendapatan dari pengembalian
- Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat penerimaan Hasil lain lain pendapatan yang sah} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \\
 &= \frac{108.252.998.780}{222.430.576.028} \times 100\% \\
 &= \mathbf{48.67\%}
 \end{aligned}$$

Indikator Sasaran	tahun 2022		tahun 2023		Persentase	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	Rp 116.758.063.820,00	Rp 108.330.408.030,93	Rp 222.430.576.028	Rp 108.252.998.780	92,78%	48,67%

➤ **Sasaran Kedua: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah**

Meningkatnya akuntabilita kinerja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator sasaran dengan mengevaluasi SAKIP dari APIP dan Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang material dari BPK RI dan APIP external

Ditahun 2022 Badan Pendapatan mendapatkan predikat SAKIP dinilai B berdasarkan penilaian dan evaluasi Inspektorat Kab Paser.hal ini dapat diupayakan Kembali untuk di nilai BB . dalam jumlah temuan BPK di tahun 2023 badan pendapatan Daerah tidak ditemukannya temuan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan dengan menggunakan skala koordinasl sebagai berikut:

80 - 100 : Sangat Berhasil

70 - <85 : Berhasil

55 - <70 : Cukup Berhasil

0 - <55 : Kurang Berhasil

Berdasarkan pengukuran kinerja pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik, dengan 2 indikator kinerja pencapaiannya BERHASIL.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bapenda Kabupaten Paser tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang secara terinci diuraikan dalam lampiran

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan Pajak Daerah di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser sebesar **78,94** dan berada pada kategori **BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pajak Daerah
di Pelayanan Pajak BAPENDA Kab.Paser

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,174	Baik	4
2.	Prosedur	3,126	Baik	7
3.	Waktu Pelayanan	3,006	baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,144	Baik	6
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,096	Baik	8
6.	Kompetensi Pelaksana	3,305	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,257	Baik	3
8.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,443	Sangat baik	1
9.	Sarana Prasarana	3,156	Baik	5

Hasil analisis dalam kategori unsur :

1. Persyaratan Pelayanan Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser berada pada kategori BAIK
2. Prosedur Pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser berada pada kategori BAIK
3. Waktu pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori SANGAT BAIK

7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori SANGAT BAIK
9. Ketersediaan sarana prasarana Masukan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK

Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan Pajak Daerah di Pajak Daerah, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup “Penanganan Pengaduan Masukan dan saran.” disusul ruang lingkup “Kompetensi Pelaksana”,

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan program/ kegiatan maupun kebijakannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan pengukuran kinerja. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN PASER

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	14%
		Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	6%
		Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	6%
		Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	10%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	71

PROGRAM

ANGGARAN

1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 3.964.855.500
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 16.405.297.650

TARGET DAN REALISASI SUB KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023

PROGRAM KEGIATAN/SUB OUTPUT	INDIKATOR	TARG ET	SATUAN	Pagu	REALISASI		CAPAIAN	
					K	RP	K	RP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Dokumen	Rp 409.149.800				

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 27.749.000	1	Rp 26.970.000	100 %	97,19 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 224.288.000	1	Rp 223.817.188	100 %	99,79 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 74.474.800	1	Rp 74.425.600	100 %	99,93 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 82.638.000	1	Rp 82.637.100	100 %	100,00 %

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				#####				0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun	Rp 13.375.151.510	1	##### ##	100 %	80,99 %
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	Rp 378.965.984	1	Rp 336.016.590	100 %	88,67 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 1.842.181.230				0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	unit	Rp 361.821.750	15	Rp 349.264.915	80%	96,53 %

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	jenis	Rp 287.214.300	8	Rp 256.054.600	80%	89,15 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	jenis	Rp 312.340.180	15	Rp 284.446.700	75%	91,07 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365	exemplar	Rp 6.600.000	170	Rp 2.550.000	47%	38,64 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	kecamatan	Rp 265.377.000	10	Rp 240.862.714	100 %	90,76 %
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1700	Berkas	Rp 608.828.000	1500	Rp 567.965.453	88%	93,29 %

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 142.638.040				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35	lembar	Rp 684.000	35	Rp 672.600	100 %	98,33 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	Rp 141.954.040	12	Rp 130.172.389	100 %	91,70 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 100.610.000				

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	Rp 48.000.000	4	Rp 38.973.400	80%	81,19 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	Rp 52.610.000	4	Rp 52.535.000	80%	99,86 %
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				Rp 3.964.855.500				0,00%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 239.055.000	1	Rp 230.870.729	100%	96,58%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokemen	Rp	189.615.000	1	Rp 189.361.861	100%	99,87%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10	Kecamatan	Rp	462.867.700	10	Rp 457.120.080	100%	98,76%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp	189.224.200	1	Rp 188.876.343	100%	99,82%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp	252.589.800	1	Rp 251.198.221	100%	99,45%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	87200 1480	wajib pajak PBB Wajib Pajak BPHTB	Rp	536.523.800	87 20 0 14 80	Rp 532.635.100	100%	99,28%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	87000	wajib Pajak	Rp	276.585.200	96 00 0	Rp 276.576.202	####	100,00 %
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp	540.519.000	1	Rp 516.088.375	100%	95,48%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	Dokumen	Rp	379.804.600	1	Rp 281.454.956	100%	74,11%
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	###	Rupiah	Rp	370.899.600	1.4 00. 00 0.0 00	Rp 365.537.199	100%	98,55%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27	Kasus	Rp	293.637.600	27	Rp 289.277.433	100%	98,52%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp	233.534.000	1	Rp 229.257.915	100%	98,17%

1. Analisis Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya anggaran. Adapun Penjabaran anggaran untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Rasio Ekonomi}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100 \% \\ &= \frac{95.18}{91.27} \times 100 \% = 95.89 \% \end{aligned}$$

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 26.977.000,- atau 97.22% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.27.749.000 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini di antaranya

- Tersedianya dokumen Dokumen RENJA Tahun 2023.

- **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 223.817.188,- atau 99.79% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 224.288.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini di antaranya

- Terlaksananya Pendanaan jasa tenaga administrasi /tenaga honorer selama 14 bulan
- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun Anggaramn 2023

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp74.425.600,- atau 99,93% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 74.474.800,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu

- Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 82637100,- atau 100% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 82.638.000,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu

- Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LkjIP).

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 10.832.931.555 atau 87.68% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 13.375.151.510,- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 336.016.590,- atau 88.67% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 416.667.184 Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu

- Tersedianya Laporan keuangan SKPD
- dokumen pelaksanaan akutansi SKPD.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 105.129.078,- atau 94,13% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 110.000.000,- hasil yang akan dicapai

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 216.865.750 atau 99,88% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 218.393.042,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu Tersedianya ATK, sarana kebersihan dan makanan dan minuman rapat.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 164.916.400,- atau 99.97%

Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp164.962.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya barang cetak seperti Amplop, Map, SPPT dan STTS, Fotocopy dan Penjilidan.

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp2.799.996,- penyerapan dana yang terealisasi Rp.1.575.000 pada sub kegiatan ini dikarenakan tidak cukupnya dana untuk memenuhi persediaan koran dan bahan bacaan di bidang dan ruangan pelayanan.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 227.701.781,- atau 90.89% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 250.515.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di dalam maupun luar daerah.

f. PenataUsahaan Arsip Dinamis SKPD

Realisasi Penyerpan dana sebesar Rp. 344.921.827 dengan Anggaran tersedia sebesar Rp349.260.000 hasil yang dicapai tersedianya Dokumen / Arsip Kantor Badan Pendapatan Daerah kab.paser.

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 350.000 atas 100% Dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 350.000,- hasil yang dicapai dikarenakan penyediaan materai telah disediakan

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 96.269.363,- atau 75.97% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.160.793.000,- Untuk keperluan belanja jasa kantor meliputi belanja telepon , belanja air dan belanja Listrik terpenuhi .

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 38.702.062,- atau 98.71% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 39.208.000,- hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini tersedianya mobil dinas yang dipelihara dan surat perizinan kendaraan dinas.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.20.300.000,- atau 100% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.20.300.000,- hasil dicapai yaitu perlengkapan gedung kantor yang terpelihara serta tercapainya pemeliharaan/rehab gedung kantor.

2. Program pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.230.870.729,- atau 96.58% Jumlah anggaran tersedia sebesar Rp.239.055.000,- hasil yang akan dicapai

- tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengembangan pendapatan.

- Faktor pendorong
 - Banyak Potensi yang masih belum tergali secara optimal
- Faktor Penghambat
 - Data wajib pajak yang belum lengkap

B. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 189.361.861,- atau 99.98% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 189.615.000,-. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan tersebut yaitu

- tersedianya dokumen intensifikasi Pajak Daerah.
- Menyusun Perkada terkait Pajak Daerah

Faktor Pendorong

- Perda pajak daerah dan retribusi daerah untuk disegerakan terbit

Faktor Penghambat

- SDM yang berbasis pendidikan Hukum tidak ada

c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp.457.120.080,- atau 98.76% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 467.867.700 Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pajak daerah meliputi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Paser.

- Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
- melaksanakan kegiatan penyuluhan, laporan evaluasi dan pelaporan tugas
- Melakukan Penyuluhan Terkait Pajak Daerah

Faktor Pendorong

- sistem dan proses kualitas yang terstruktur
- Penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan cara penggunaan Aplikasi Sistem SIMPADATAKA

- Menyuluh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah terbit dan Aplikasi Simpadataka

Faktor Penghambat

- adanya perbedaan pandangan dari beberapa anggota dalam penyusunan serta penerapan SOP
- Permasalahan Administrasi, Kebijakan Hingga Respon Masyarakat

d.Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 188.876.343,- atau 99.82% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 189.224.200,- Pada sub kegiatan ini didapatkan hasil

- jumlah objek pajak yang didata dalam bentuk satuan dokumen.
- Optimalisasi pendataan objek pajak daerah dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ;pajak makan minuman (catering) hotel, air bawah tanah, reklame,MBLB , sarang burung, Hiburan , dan parkir.

Faktor pendorong

- Melakukan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah PT. Kideco Jaya Agung dan PT pada sub Kontraktor kideco

Factor Penghambat

- Lemahnya penegak hukum berupa pengawasan dn sanksi
- Kurangnya SDM dan lemah kualitas aparatur

i. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 251.198.221 atau 99.45% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp252.589.800,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah

- tersedianya dokumen penerimaan pajak daerah.
- Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pencocokan data transaksi penerimaan Bersama OPD penerima retribusi daerah dan Bank Kaltimtara setiap bulannya

Faktor Pendorong

- Tediannya data yang sistemati secara elektronik

Faktor Penghambat

- Belum integrasi nya aplikasi sehingga sering terjadi perbedaan data

f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 532.635.100,- atau 99.28% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 536.523.800,- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu te

- rsedianya dokumen jumlah PBB dan BPHTB yang telah diverifikasi.
- Memberikan sosialisasi dan turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing objek pajak
- Melakukan pemutakhiran data (update) wajib pajak dan OPPBB-p2 yang ada pada system SISMIOP

Faktor Pendorong

- Kurang lengkapnya persyaratan administrsi gguna kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran baru, pebetulan dan penghapusan pajak PBB-P2 dan BPHTB P2
- Data kondisi objek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi objek pajak yang sebenarnya.

Faktor Penghambat

- Kurangnya Melakukan pemutakhiran data (UPDATE) WP dan OP PBB_P2 baik lapangan maupun yang ada pada system SISMIOP.

g. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 276.576.202,- atau 94,33% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 276.585.200,- . Hasil yang dicapai yaitu Tersedianya dokumen wajib pajak yang telah ditetapkan.

- Optimalisasi penetapan objek pajak dalam rang

h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 516.088.375,- atau 95.48% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp540.519.000,-. Hasil yang dicapai adalah

- tersedianya dokumen tentang jumlah pelayanan dan konsultasi pajak yang diterima.
- Mengoptimalkan pelayanan kepuasan masyarakat dalam berkonsultasi pajak daerah dalam rangka pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan SPTPD dalam penyeteroran wajib pajak :makanan dan minuman ,Hotel ,MBLB, papan reklame, sarang burung wallet , air bawah tanah hiburan dan paker

Faktor pendorong

- Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan dalam rangka kepatuhan wajib pajak untuk segera membayar pajak orng pribadi ,organisasi

Faktor Penghambat

- SDM wajib Pajak masih rendah memahami tentang pentingnya pembayaran pajak
- Pengetahuan Masyarakat kurang mengerti tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 281.454.856,- atau 74.11% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 379.804.600,- tersedianya dokumen berisi jumlah data hasil pemeriksaan pajak daerah adalah capaian yang terdapat pada sub kegiatan ini.

1. Melaksanakan pemutakhiran data PBB-P2 Sebanyak 4500 wajib pajak

Factor pendorong:

- Koordinasi yang baik dengan pihak desa/ kelurahan

Faktor penghambat

- Sebagian besar wajib pajak keberatan dalam memberikan data yang diberikan surveyor

j. Penagihan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 365.537.199,- atau 98.55% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 370.899.600 ,-

- Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan adalah tunggakan pajak daerah yang telah diselesaikan. Serta melaksanakan piutang pajak daerah sebagaimana yang tertuang pada daftar piutang pajak daerah tahun 2023 melalui surat tagihan , surat teguran 1, surat teguran 2, surat teguran 3

Faktor Pendorong

- Penambahan personal dan peningkatan SDM
- Diperlukan teknologi yang mendukung dan mempermudah agar surat tagihan , surat teguran 1, surat teguran 2, surat teguran 3 diterima wajib pajak

Faktor penghambat

- Keterbatasan tenaga, waktu oleh petugas dalam menyampaikan surat tagihan , surat teguran 1, surat teguran 2, surat teguran 3 ke masing masing Alamat wajib pajak
- Tidak responnya wajib pajak atas surat tagihan surat teguran 1, teguran 2, teguran 3

k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 289.277.433,- atau 98,25% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 293.637.600

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah

- diselesaikan 43 kasus keberatan pajak daerah dari 41 kasus yang ditargetkan.
- Pelaksanaan pemberian layanan keberatan, pengurangan, keringanan dan permohonan banding atas materi penetaoran pajak daerah
- Sosialisasi pengajuan keberatan pengurangan dan keringanan pajak daerah

Faktor Pendorong

- Pertumbuhan ekonomi menunjang sumber potensi pajak daerah , Dimana akan mempengaruhi daya beli Masyarakat dan kemampuan untuk membayar pajak dan akan menunjang potensi penerimaan pajak daerah
- Jumlah penduduk , dalam hal ini wajib pajak baru menjadi factor dalam mempengaruhi potensi penerimaan pajak daerah

Factor penghambat

- Kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam pengajuan keberatan ,keringanan dan pengurangan
- Rendahnya kesadaran kepatuhan wajib pajak untuk membayar tepat waktu kurang sosialisasi terkait pengajuan keberatan pengurangan dan keringanan pajak daerah

I. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp 229.257.915,- atau 98.17% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 233.534.000,-Tersedianya

- Dokumen Laporan Retribusi Daerah berupa pemeriksaan pajak daerah dengan tujuan terlaksananya pemeriksaan pajak daerah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- Melakukan pengawasan ,pemeriksaan dan pengendalian kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan daerah dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan retribusi kepada OPD penghasil

Faktor pendorong

- Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi daerah , adanya perlawanan dari wajib pajak terhadap aturan yang akan diterapkam ini akan berakibat tidak baik bagi iklim perpajakan daerah dan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi pelaku usaha lainnya

Factor penghambat

- Regulasi pengawasan dan pemeriksaan yang masih dalam proses sehingga pengawasan ,pemeriksaan belum bisa dijalankan secara optimal
- Kapabilitas SDM internal pengawasan yang masih kurang pemahaman terhadap mekanisme pengawasan , koordinasi dan kalaborasi dengan sub bidang terkait
- Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan cenderung memanipulasi data atau pembayaran terkait omset usahanya



Bapenda
KABUPATEN PASER

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja dan Penetapan Kinerja menjadi Perjanjian Kinerja.

secara umum sasaran tersebut telah tercapai dengan baik. Untuk Indikator Pencapaian Sasaran yang belum tercapai 100% di masa mendatang akan diupayakan kerja keras dan semangat yang tinggi dari seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, dukungan Pemerintah Kabupaten Paser dan Instansi terkait serta masyarakat untuk meningkatkan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.

Namun di samping keberhasilan yang telah dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser tersebut diatas, juga tidak lepas dari kendala-kendala yang ada, diantaranya adalah:

- a. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai;
- b. Belum optimal pendidikan dan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan profesionalisme;
- c. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
- d. Belum adanya gedung defenitif, sehingga ruang kerja yang kurang presentatif dan ruang pelayanan terhadap wajib pajak tidak maksimal.

B. Saran

Upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Paser dalam menghadapi kendala-kendala yang ada:

- a. Meningkatkan disiplin dan pelatihan pegawai dalam pengelolaan PAD terutama dalam rangka peningkatan SDM,
- b. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas / Unit Kerja terkait dalam pengelolaan PAD sehingga ada kebersamaan komitmen dalam meningkatkan pendapatan daerah secara optimal,
- c. Melakukan monitoring / penagihan dan teguran langsung terhadap wajib pajak yang belum membayar / melunasi pajak daerah,
- d. Melakukan pemeriksaan ke lokasi atas permohonan keberatan dan angsuran,
- e. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good and Clean Government* yang melibatkan *Stake Holders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan

Tana Paser, Maret 2024

Kepala Badan



Ali Nour Muhamad, SE

NIP 19730903 200604 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Dr. FAHMI FADLI
Jabatan : BUPATI PASER
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

BUPATI PASER,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER

Dr. FAHMI FADLI



ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	13%
		Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	5%
		Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	5%
		Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	9%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP dari APIP	B

PROGRAM

ANGGARAN

1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	2.847.985.500,00
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	12.144.687.544,00

BUPATI PASER



Drs. FAHMI FADLI

Tana Paser, Februari 2023

**KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**



ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : IBRAHIM, S.Sos, MM
Jabatan : SEKRETARIS BAPENDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tana Paser, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER,

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PASER



ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012


IBRAHIM, S.Sos, MM
NIP. 19751011 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72%

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp	12.144.687.544,00
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota	Rp	396.519.800,00
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	10.771.896.569,00
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	817.446.095,00
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	125.340.080,00
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	33.485.000,00

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER



ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012

Tana Paser, Februari 2023

SEKRETARIS BAPENDA

IBRAHIM, S.Sos, MM
NIP. 19751011 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : SUPRIYANTO, SKM
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : IBRAHIM, S.Sos, MM
Jabatan : SEKRETARIS BAPENDA

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

SEKRETARIS BAPENDA,

IBRAHIM, S.Sos, MM
NIP. 19751011 199603 1 002

KEPALA SUBBAGIAN UMUM

SUPRIYANTO, SKM
NIP. 19660407 198612 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Gedung Kantor, Alat Tulis Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 Jenis
		Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis
		Tersedianya Koran dan Peraturan Perundang-undangan	365 Exemplar
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	30 Koordinasi
		Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	1700 Berkas
2	Meningkatnya Penyediaan Jasa dan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Benda Pos	60 Lembar
		Tersedianya Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan
3	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	66.151.515,00
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	193.732.300,00
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	151.961.780,00
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	3.817.500,00
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	154.983.000,00
6.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	246.800.000,00
7.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	349.980,00
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	124.990.100,00
9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	11.500.000,00
10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	21.985.000,00

Tana Paser, Februari 2023

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

SEKRETARIS BAPENDA



IBRAHIM, S.Sos, MM
NIP. 19751011 199603 1 002



SUPRIYANTO, SKM
NIP. 19700125 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : AINUN JARIAH. AR, SE

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : IBRAHIM, S.Sos, MM

Jabatan : SEKRETARIS BAPENDA

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

SEKRETARIS BAPENDA,

IBRAHIM, S.Sos, MM
NIP. 19751011 199603 1 002

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA

AINUN JARIAH. AR, SE
NIP. 19690321 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Hj. ELVA ARA VERA, SE

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : IBRAHIM, S.Sos, MM

Jabatan : SEKRETARIS BAPENDA

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

SEKRETARIS BAPENDA,

IBRAHIM, S.Sos, MM
NIP. 19751011 199603 1 002

PERENCANA AHLI MUDA

Hj. ELVA ARA VERA, SE
NIP. 19700125 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Dokumen
		Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan	2 Dokumen
		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen
		Dokumen Evaluasi Kinerja	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ANGGARAN

Rp	23.999.000,00
Rp	194.438.000,00
Rp	89.124.800,00
Rp	88.958.000,00

Tana Paser, Februari 2023

SEKRETARIS BAPENDA

IBRAHIM, S.Sos, MM
NIP. 19751011 199603 1 002

PERENCANA AHLI MUDA

HJ. ELVA ARA VERA, SE
NIP. 19700125 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Hj. ELFRIDA VERONICA, SE
Jabatan : KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGAWASAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER,



ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012

KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Hj. ELFRIDA VERONICA, SE
NIP. 19721116 200003 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

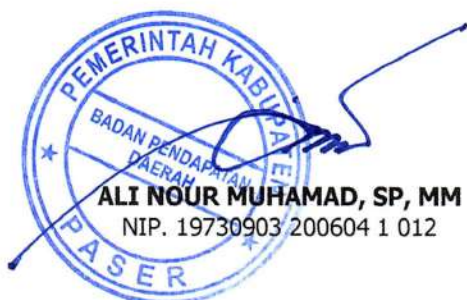
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	7,7%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 748.071.200,00
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 748.071.200,00

Tana Paser, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

**KEPALA BIDANG PENAGIHAN,
KEBERATAN DAN PENGAWASAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH**



ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012



HJ. ELFRIDA VERONICA, SE
NIP. 19721116 200003 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : MAHMUD, SE, M.Si
Jabatan : KASUB BID PENAGIHAN PAJAK DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Hj. ELFRIDA VERONICA, SE
Jabatan : KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Hj. ELFRIDA VERONICA, SE
NIP. 19721116 200003 2 004

KASUB BID PENAGIHAN PAJAK DAERAH

MAHMUD, SE, M.Si
NIP. 19730124 200604 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah yang Diselesaikan	Rp 1.300.000.000,00

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penagihan Pajak Daerah

Rp 318.899.600,00

Tana Paser, Februari 2023

**KEPALA BIDANG PENAGIHAN,
KEBERATAN DAN PENGAWASAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**


HJ. ELFRIDA VERONICA, SE
NIP. 19721116 200003 2 004

**KEPALA SUB BIDANG
PENAGIHAN PAJAK DAERAH**


MAHMUD, SE M.Si
NIP. 19730124 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : YUSMARULI, SE

Jabatan : KASUB BID PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Hj. ELFRIDA VERONICA, SE

Jabatan : KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGAWASAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Hj. ELFRIDA VERONICA, SE
NIP. 19721116 200003 2 004

KASUB BID PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

YUSMARULI, SE
NIP. 19690502 199303 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Rp 219.534.000,00

**KEPALA BIDANG PENAGIHAN,
KEBERATAN DAN PENGAWASAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



HJ. ELFRIDA VERONICA, SE
NIP. 19721116 200003 2 004

Tana Paser, Februari 2023

**KEPALA SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN**



YUSMARULI, SE
NIP. 19690502 199303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : RINA RESTIANA, S.Sos
Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Hj. ELFRIDA VERONICA, SE
Jabatan : KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN
PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA

Hj. ELFRIDA VERONICA, SE
NIP. 19721116 200003 2 004

RINA RESTIANA, S.Sos
NIP. 19770127 200604 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang Diselesaikan	41 Kasus

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penagihan Pajak Daerah

Rp 209.637.600,00

**KEPALA BIDANG PENAGIHAN,
KEBERATAN DAN PENGAWASAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**


HJ. ELFRIDA VERONICA, SE
NIP. 19721116 200003 2 004

Tana Paser, Februari 2023

**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA**


RINA RESTIANA, S.SOS
NIP. 19730124 200604 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : TRI GUNAWAN, ST, MM

Jabatan : KABID PENGELOLAAN PBB-P2 DAN BPHTB

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER,

KABID PENGELOLAAN PBB-P2 DAN BPHTB


ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012


TRI GUNAWAN, ST, MM
NIP. 19721218 199803 1 010

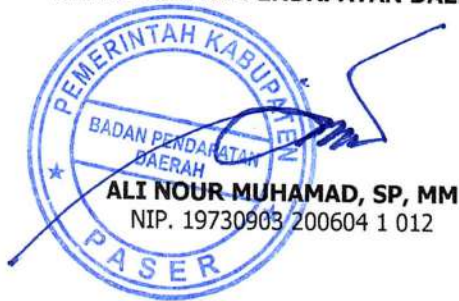
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	7,7%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 768.918.200,00
1. Kegiatan Pengelolan Pendapatan Daerah	Rp 768.918.200,00


Tana Paser, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012

**KEPALA BIDANG,
PENGELOLAAN PBB-P2 DAN
BPHTB**



TRI GUNAWAN, ST, MM
NIP. 19721218 199803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Hj. HERY NOVITA SARI, SP
Jabatan : KASUB BID PENILAIAN PBB-P2 DAN BPHTB
Selanjutnya disebut pihak pertama


N a m a : TRI GUNAWAN, ST, MM
Jabatan : KABID PENGELOLAAN PBB-P2 DAN BPHTB
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tana Paser, Februari 2023

KABID PENGELOLAAN PBB-P2 DAN BPHTB



TRI GUNAWAN, ST, MM
NIP. 19721218 199803 1 010

KASUB BID PENILAIAN PBB-P2 DAN
BPHTB



Hj. HERY NOVITA SARI, SP
NIP. 19791214 200901 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah PBB dan BPHTB yang diverifikasi	8700 WP PBB dan 1400 WP BPHTB


SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp 348.523.800,00

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PBB-P2
DAN BPHTB**



TRI GUNAWAN, ST, MM
NIP. 19721218 199803 1 010

Tana Paser, Februari 2023
**KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN
PBB-P2 DAN BPHTB**



HJ. HERY NOVITA SARI, SP
NIP. 19791214 200901 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : SYAFTA CATURIANDINI, SE, M.Si
Jabatan : KASUB BID PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN
PAJAK DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : TRI GUNAWAN, ST, MM
Jabatan : KABID PENGELOLAAN PBB-P2 DAN BPHTB

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PENGELOLAAN PBB-P2 DAN BPHTB KASUB BID PENELITIAN DAN VERIFIKASI
DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH

TRI GUNAWAN, ST, MM
NIP. 19721218 199803 1 010

SYAFTA CATURIANDINI, SE, M.Si
NIP. 19831002 200903 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah

Rp 196.804.600,00

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PBB-P2
DAN BPHTB**


TRI GUNAWAN, ST, MM
NIP. 19721218 199803 1 010

Tana Paser, Februari 2023
**KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN
VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK
DAERAH**


SYAFTA CATURIANDINI, SE, M.Si
NIP. 19831002 200903 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : DAHLIA, SE
Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : TRI GUNAWAN, ST, MM
Jabatan : KABID PENGELOLAAN PBB-P2 DAN BPHTB
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PENGELOLAAN PBB-P2 DAN BPHTB

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA

TRI GUNAWAN, ST, MM
NIP. 19721218 199803 1 010

DAHLIA, SE
NIP. 19770521 200903 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

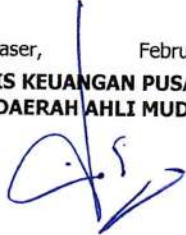
Rp 223.589.800,00

**KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PBB-P2
DAN BPHTB**



TRI GUNAWAN, ST, MM
NIP. 19721218 199803 1 010

Tana Paser, Februari 2023
**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA**



DAHLIA, SE
NIP. 19770521 200903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : SITI MARNITASARI, SE, MM
Jabatan : KABID PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER,

KABID PERENCANAAN, PENGEMBANGAN
DAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH



ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012

SITI MARNITASARI, SE, MM
NIP. 19710416 199803 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	7,7%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 537.037.700,00
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 537.037.700,00

Tana Paser, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN
SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH




SITI MARNITASARI, SE, MM
NIP. 19710416 199803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : RUGAIYAH

Jabatan : KASUB BID PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : SITI MARNITASARI, SE, MM

Jabatan : KABID PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PERENCANAAN, PENGEMBANGAN
DAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH

KASUB BID PENGEMBANGAN PAJAK
DAERAH

SITI MARNITASARI, SE, MM
NIP. 19710416 199803 2 003

RUGAIYAH
NIP. 19690305 198902 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	1 Dokumen
		Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Rp | 205.555.000,00 |
| 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Rp | 144.535.000,00 |

Tana Paser, Februari 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN DAN SARANA
PRASARANA PAJAK DAERAH**



SITI MARNITASARI, SE, MM
NIP. 19710416 199803 2 003

**KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH**



RUGAYAH
NIP. 19690305 198902 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : BADRI KURMAYA, ST
Jabatan : KASUB BID PENYULUHAN DAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : SITI MARNITASARI, SE, MM
Jabatan : KABID PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PERENCANAAN, PENGEMBANGAN
DAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH

KASUB BID PENYULUHAN DAN
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

SITI MARNITASARI, SE, MM
NIP. 19710416 199803 2 003

BADRI KURMAYA, ST
NIP. 19731225 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Rp 174.867.700,00

Tana Paser, Februari 2023

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN DAN SARANA
PRASARANA PAJAK DAERAH**



SITI MARNITASARI, SE, MM
NIP. 19710416 199803 2 003

**KEPALA SUB BIDANG PENYULUHAN DAN
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**



BADRI KURMAYA, ST
NIP. 19731225 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ZAINAL ABIDIN, SE

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : SITI MARNITASARI, SE, MM

Jabatan : KABID PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PERENCANAAN, PENGEMBANGAN
DAN SARANA PRASARANA PAJAK DAERAH

SITI MARNITASARI, SE, MM
NIP. 19710416 199803 2 003

ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH AHLI MUDA

ZAINAL ABIDIN, SE
NIP. 19720922 200502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Rp 12.080.000,00

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN DAN SARANA
PRASARANA PAJAK DAERAH**



SITI MARNITASARI, SE, MM
NIP. 19710416 199803 2 003

Tana Paser, Februari 2023

**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA**



ZAINAL ABIDIN, SE
NIP. 19720922 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : NANI MARIANI, SE
Jabatan : KABID PENDATAAN PENETAPAN DAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER,

KABID PENDATAAN PENETAPAN DAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH


ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012


NANI MARIANI, SE
NIP. 19670624 200212 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

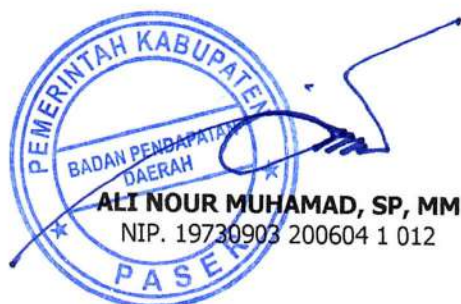
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	7,5%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 793.958.400,00
1. Kegiatan Pengelolan Pendapatan Daerah	Rp 793.958.400,00

Tana Paser, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

**KEPALA BIDANG,
PENDATAAN, PENETAPAN DAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH**



ALI NOUR MUHAMAD, SP, MM
NIP. 19730903 200604 1 012



NANI MARIANI, SE
NIP. 19670624 200212 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : BASRAN, A.Md

Jabatan : KASUB BID PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : NANI MARIANI, SE

Jabatan : KABID PENDATAAN PENETAPAN DAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PENDATAAN PENETAPAN DAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH

NANI MARIANI, SE
NIP. 19670624 200212 2 005

KASUB BID PELAYANAN DAN
KONSULTASI PAJAK DAERAH

BASRAN, A.Md
NIP. 19670911 199103 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Rp

376.149.000,00

**KEPALA BIDANG PENDATAAN,
PENETAPAN DAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH**



NANI MARIANI, SE
NIP. 19670624 200212 2 005

Tana Paser, Februari 2023

**KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN
DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH**



BASRAN, A.Md
NIP. 19670911 199103 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : AGUSTIN ARYATIE, SE
Jabatan : KASUB BID PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : NANI MARIANI, SE
Jabatan : KABID PENDATAAN PENETAPAN DAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PENDATAAN PENETAPAN DAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH

NANI MARIANI, SE
NIP. 19670624 200212 2 005

KASUB BID PENETAPAN WAJIB PAJAK
DAERAH

AGUSTIN ARYATIE, SE
NIP. 19770823 200502 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Ditetapkan	1590 Wajib Pajak

SUB KEGIATAN

1. Penetapan Wajib Pajak Daerah

ANGGARAN

Rp 252.585.200,00

**KEPALA BIDANG PENDATAAN,
PENETAPAN DAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH**



NANI MARIANI, SE
NIP. 19670624 200212 2 005

Tana Paser, Februari 2023

**KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN
WAJIB PAJAK DAERAH**



AGUSTIN ARYATIE, SE
NIP. 19770823 200502 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Basuki Rahmat No. 1 (0543) 24772-23816 Tana Paser

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ERRY EDWARD, S.Sos, M.Si

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : NANI MARIANI, SE

Jabatan : KABID PENDATAAN PENETAPAN DAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Februari 2023

KABID PENDATAAN PENETAPAN DAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH

NANI MARIANI, SE

NIP. 19670624 200212 2 005

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA

ERRY EDWARD, S.Sos, M.Si

NIP. 19840209 201001 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang di Data	1 Dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Rp 165.224.200,00

**KEPALA BIDANG PENDATAAN,
PENETAPAN DAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH**



NANI MARIANI, SE
NIP. 19670624 200212 2 005

Tana Paser, Februari 2023
**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA**



ERRY EDWARD, S.SOS, M.Si
NIP. 19840209 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROSES BISNIS



I. TABEL IDENTIFIKASI PROSES

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1.	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Utama	Bapenda01
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Pendukung	Bapenda02

II. TABEL IDENTIFIKASI SUB PROSES

PROSES	KODE PROSES	SUB PROSES	KODE SUB PROSES
Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Bapenda 01	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda 01.01
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Bapenda 02	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bapenda 02.01

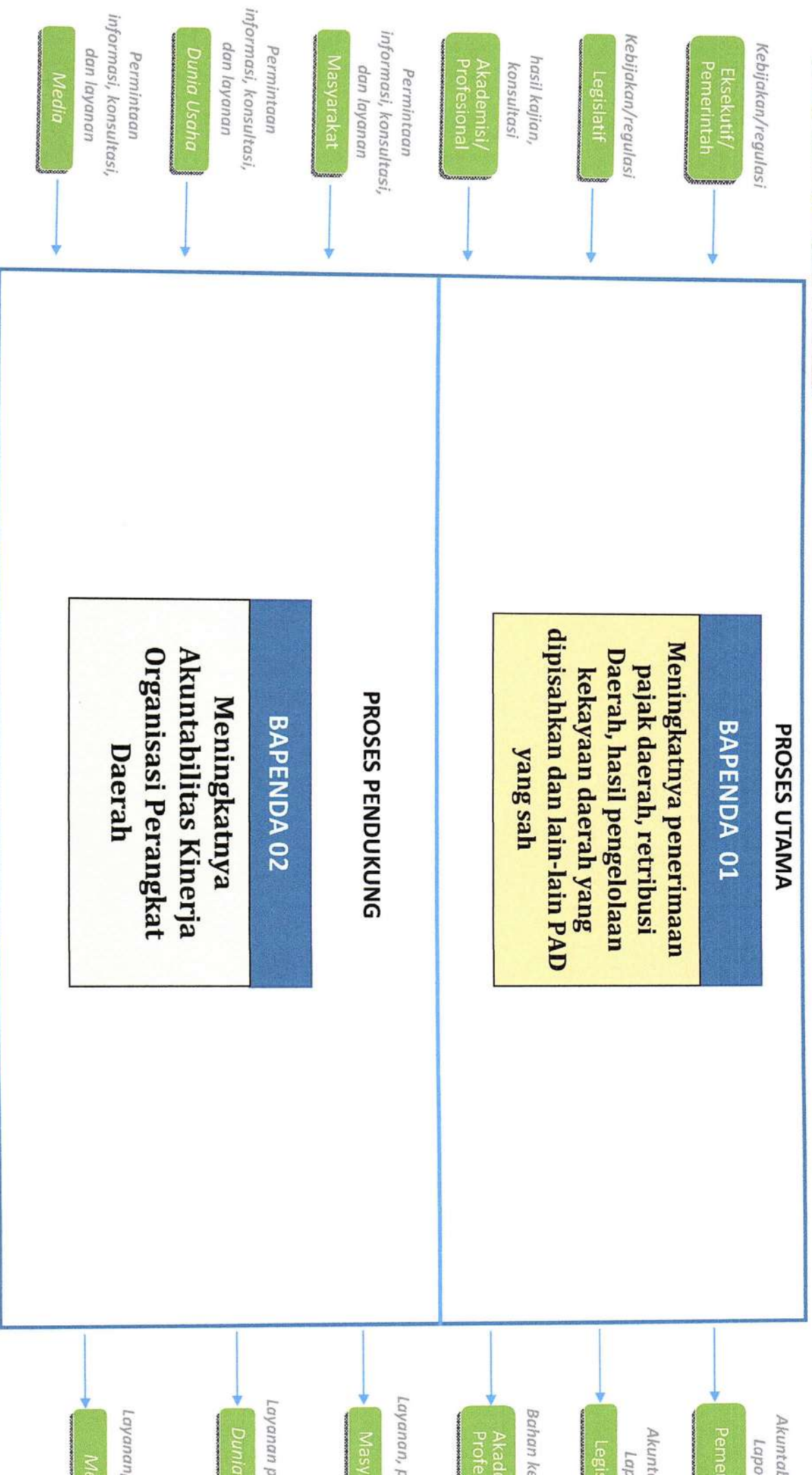
III. TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI

PROSES	SUB PROSES	LINTAS FUNGSI		KODE LINTAS FUNGSI
Bapenda 01	Bapenda 01.01			
Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda 01.01. CFM 01
Bapenda 02	Bapenda 02.01			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda 02.01. CFM 01
		2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bapenda 02.01. CFM 02
		3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bapenda 02.01. CFM 03
		4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda 02.01. CFM 04
		5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bapenda 02.01. CFM 04

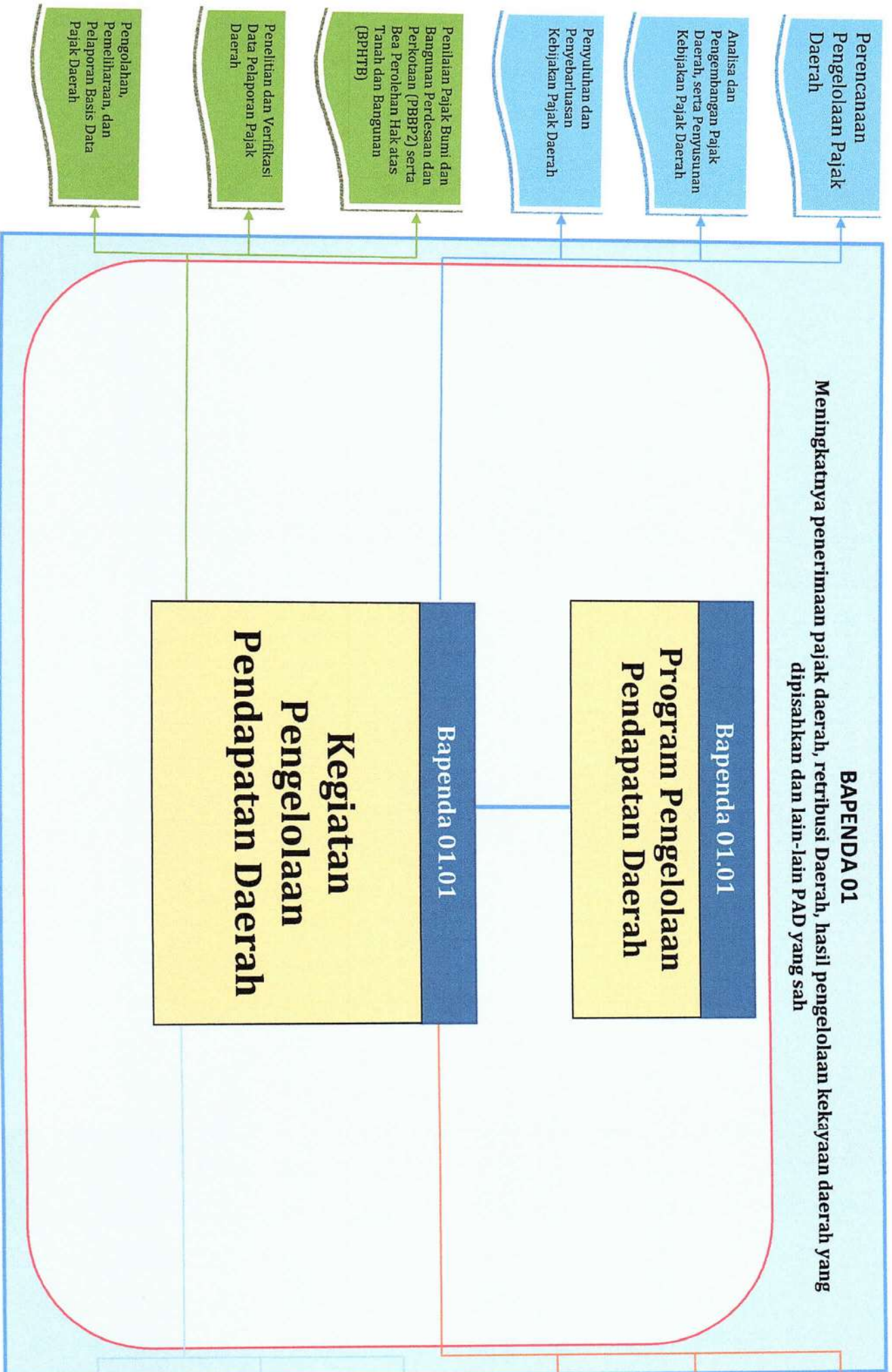
Supplier & Input

Output & Customer

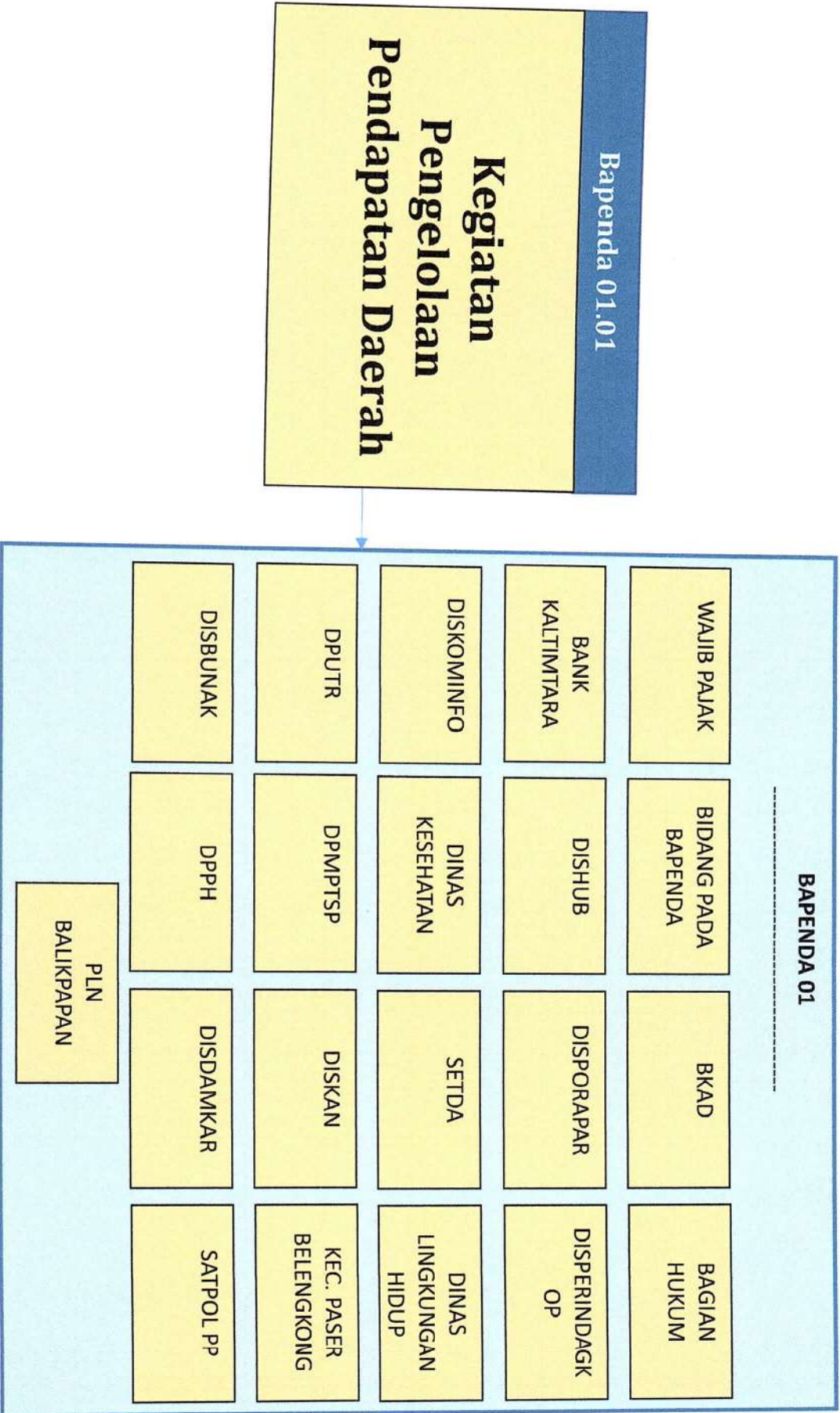
Peta Proses Bisnis BAPENDA Kab. Paser



Peta Sub Proses Badan Pendapatan Daerah



Peta Relasi Kabupaten Paser



Bapenda 01.01

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

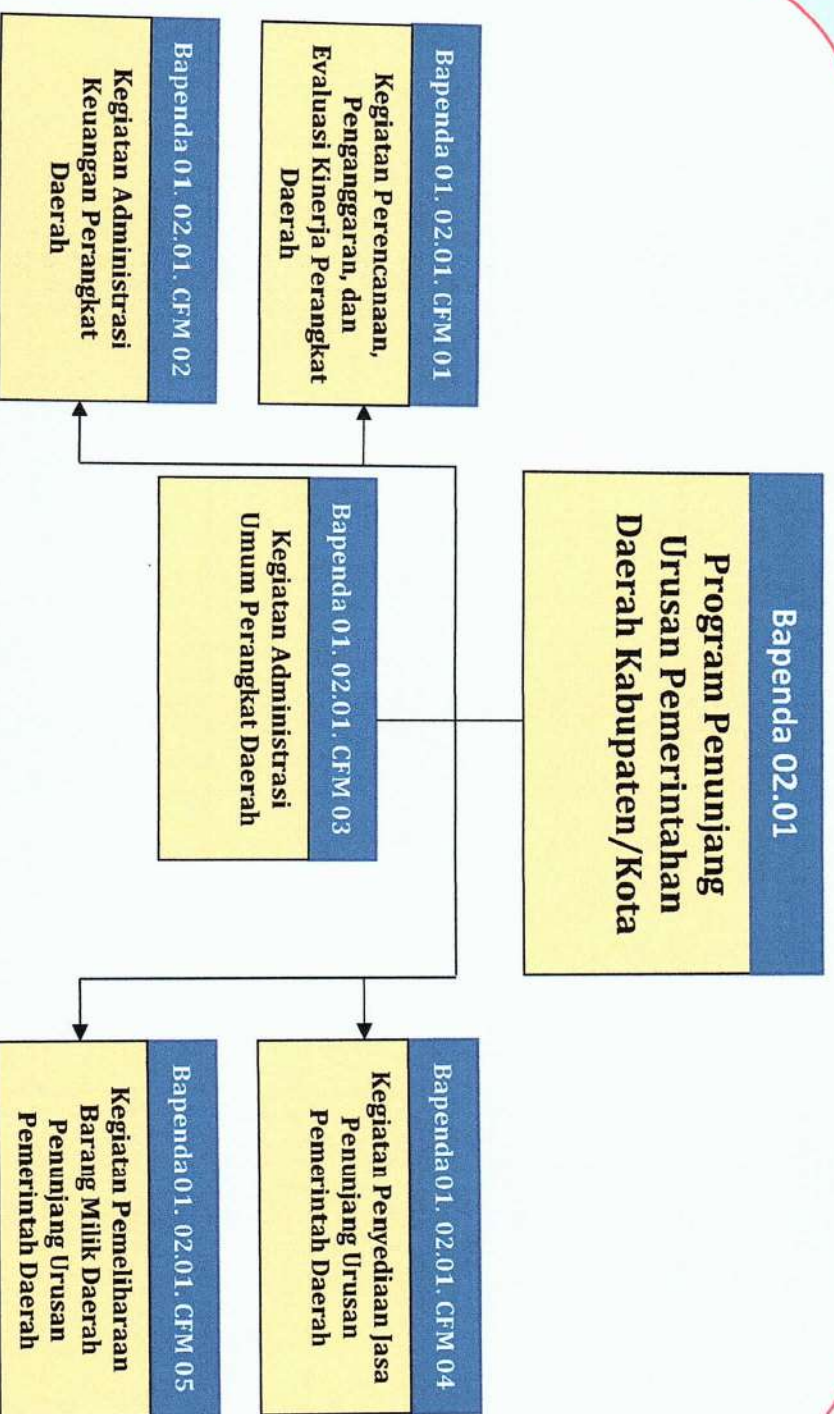
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

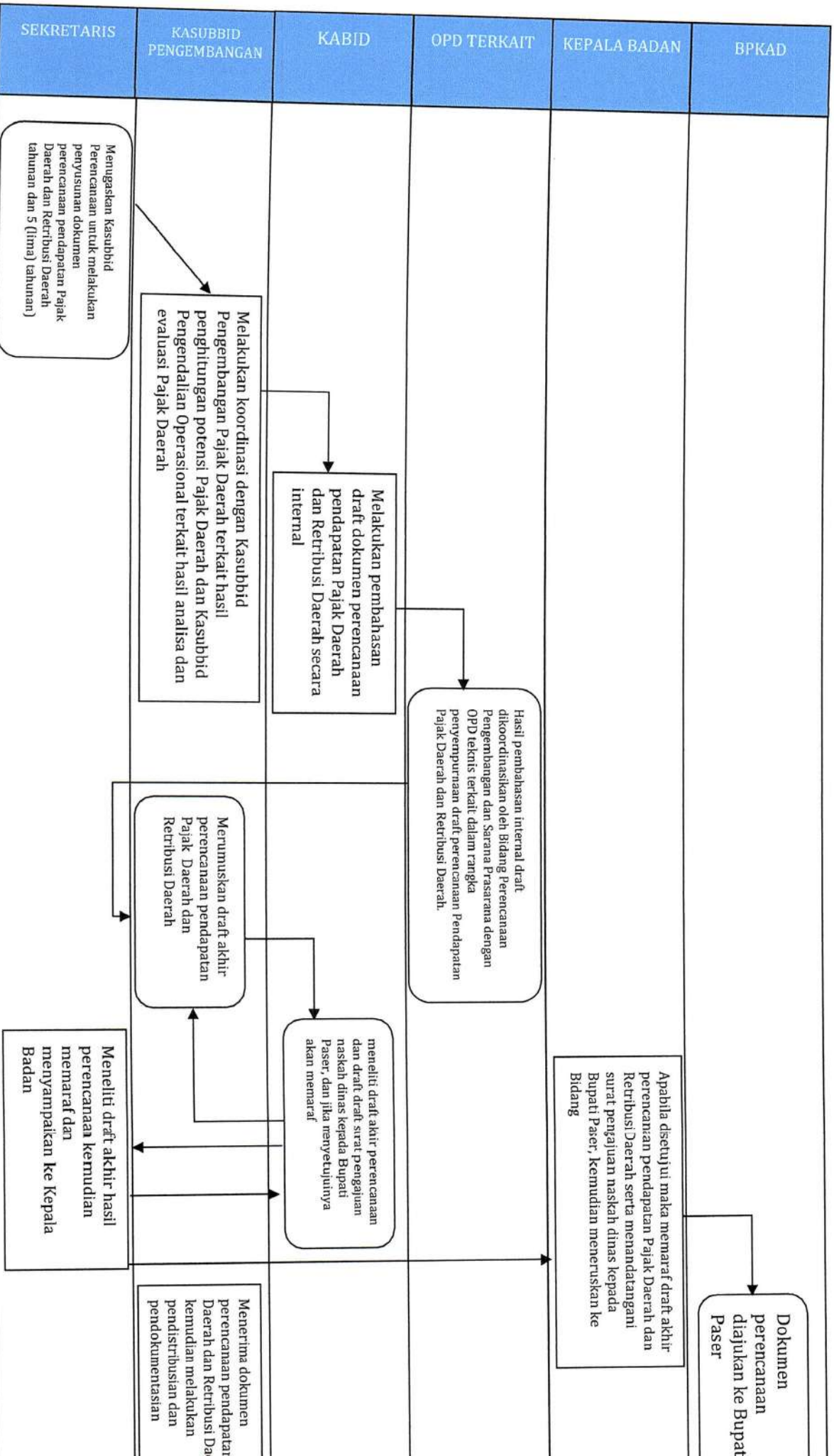
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

BAPENDA 02

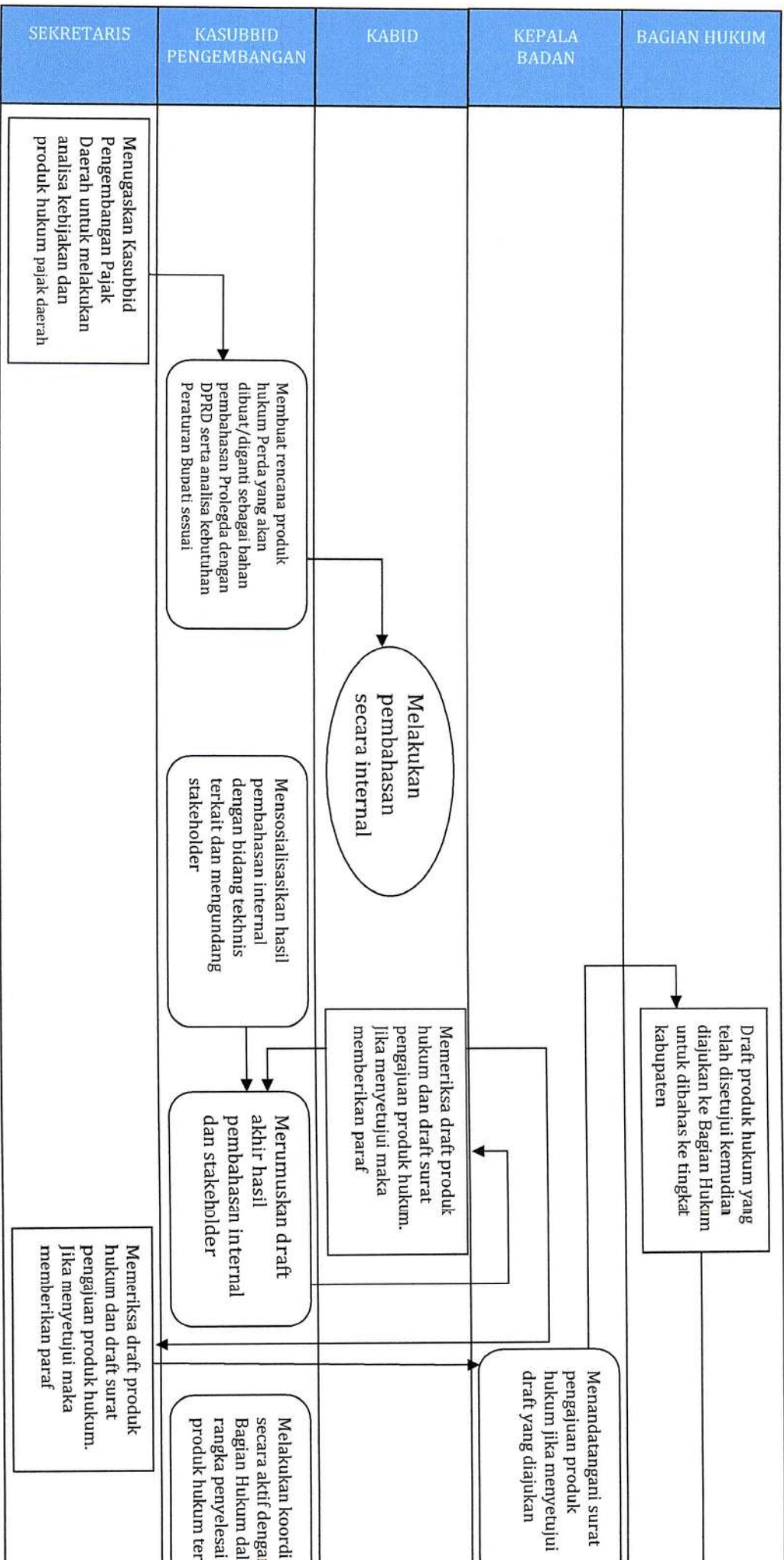
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah



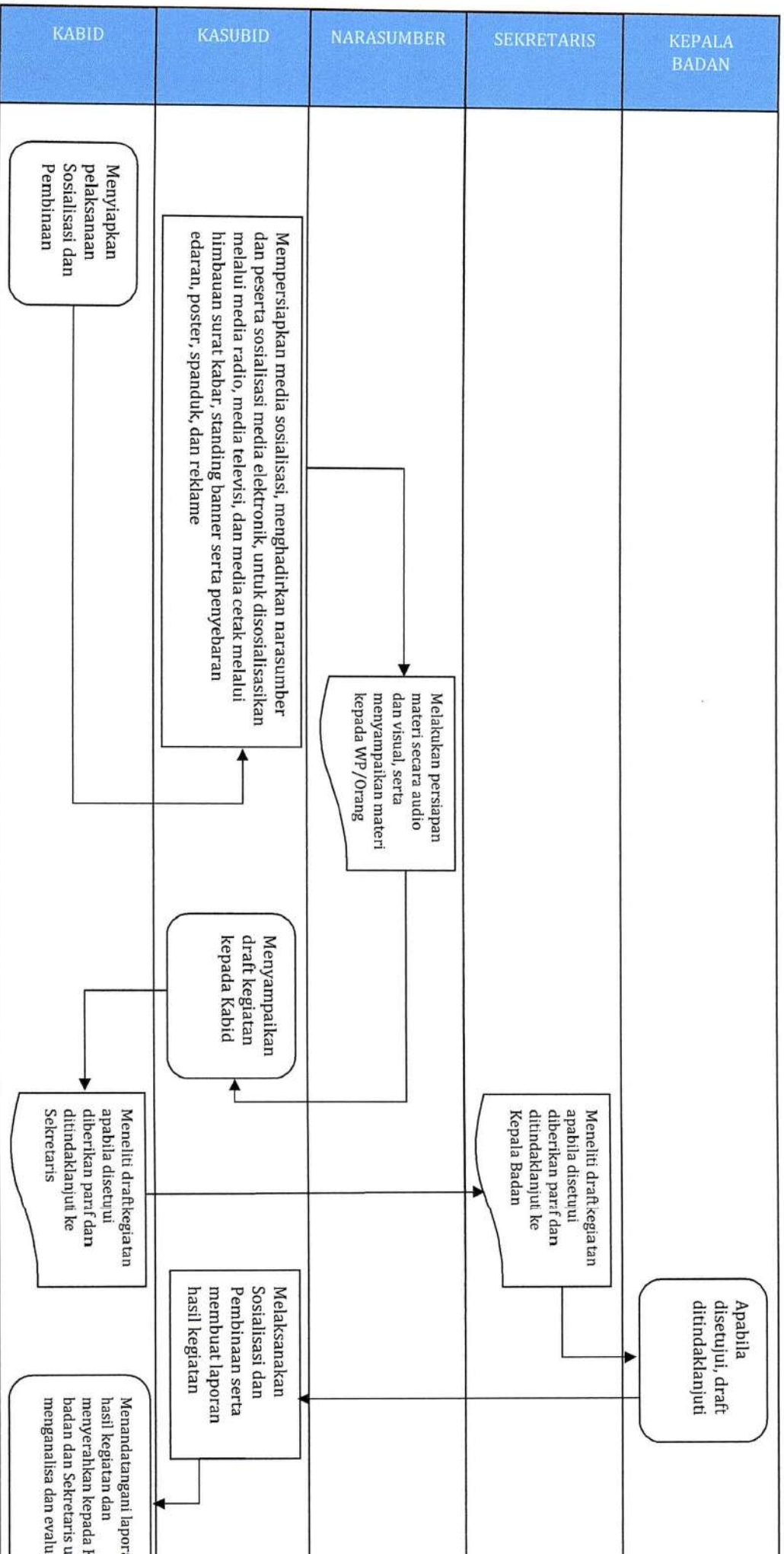
PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

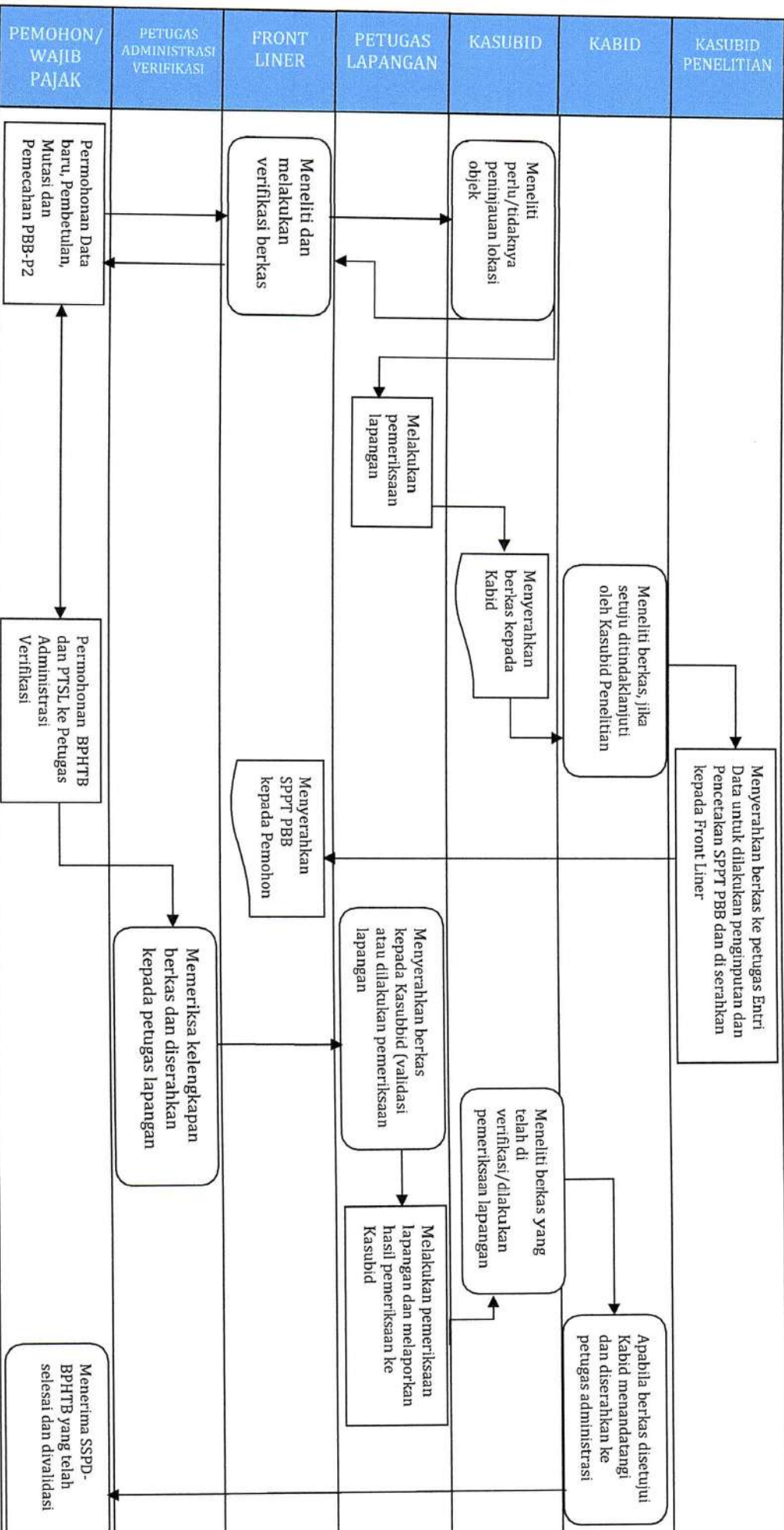


ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH



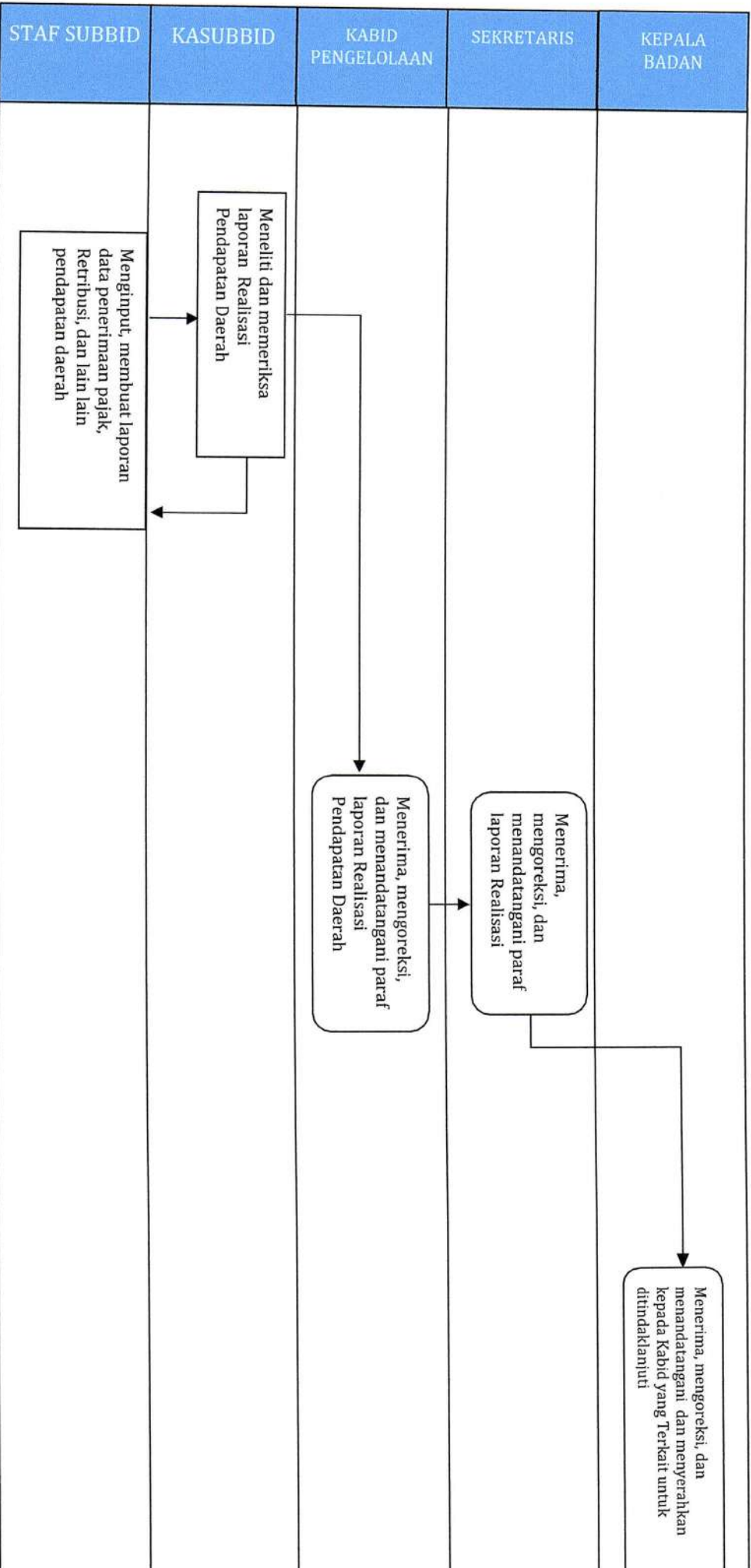
PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH



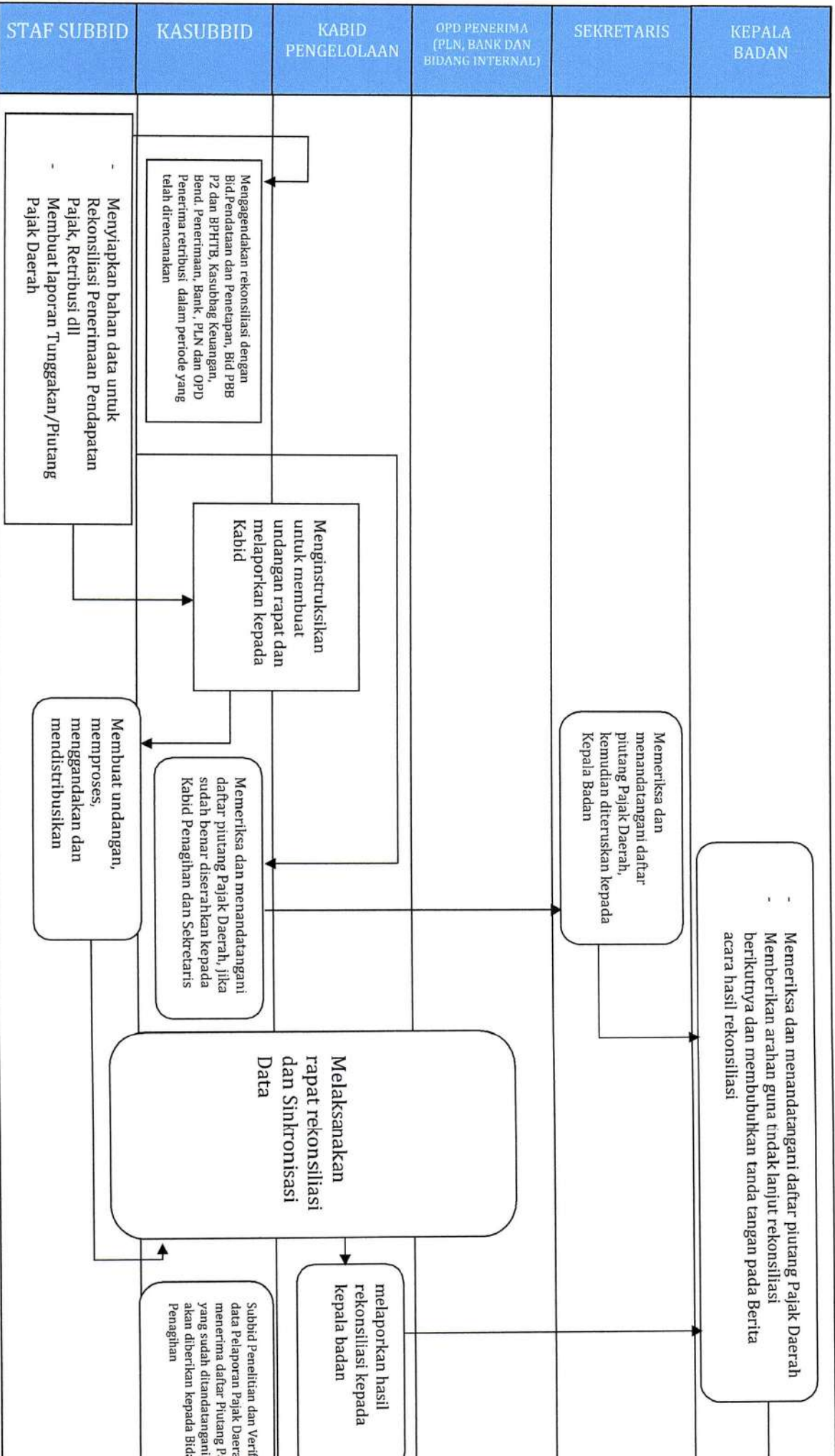


BAPENDA 01.01 CFM 05

PENGOLAHAN PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH

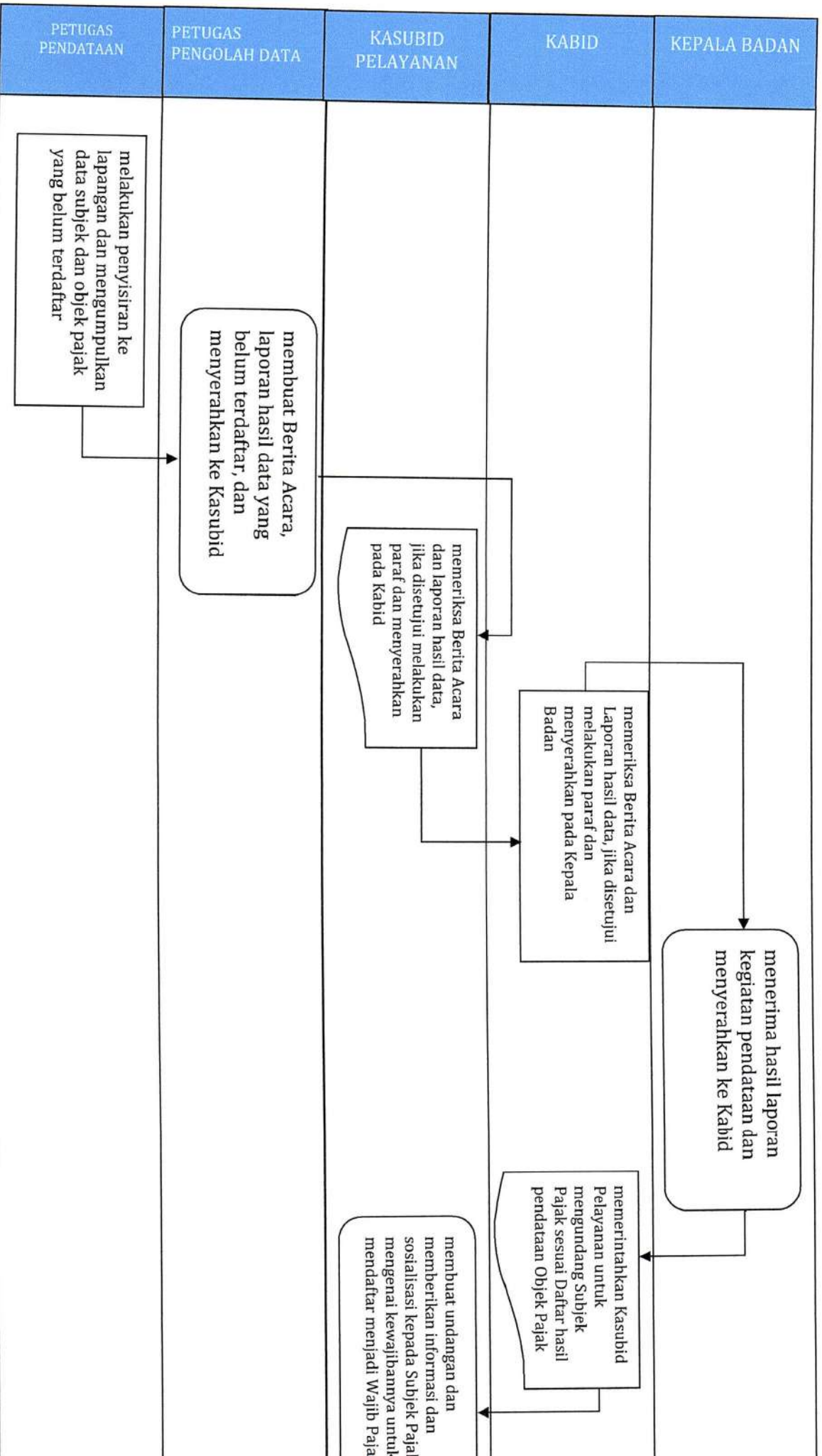


PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH



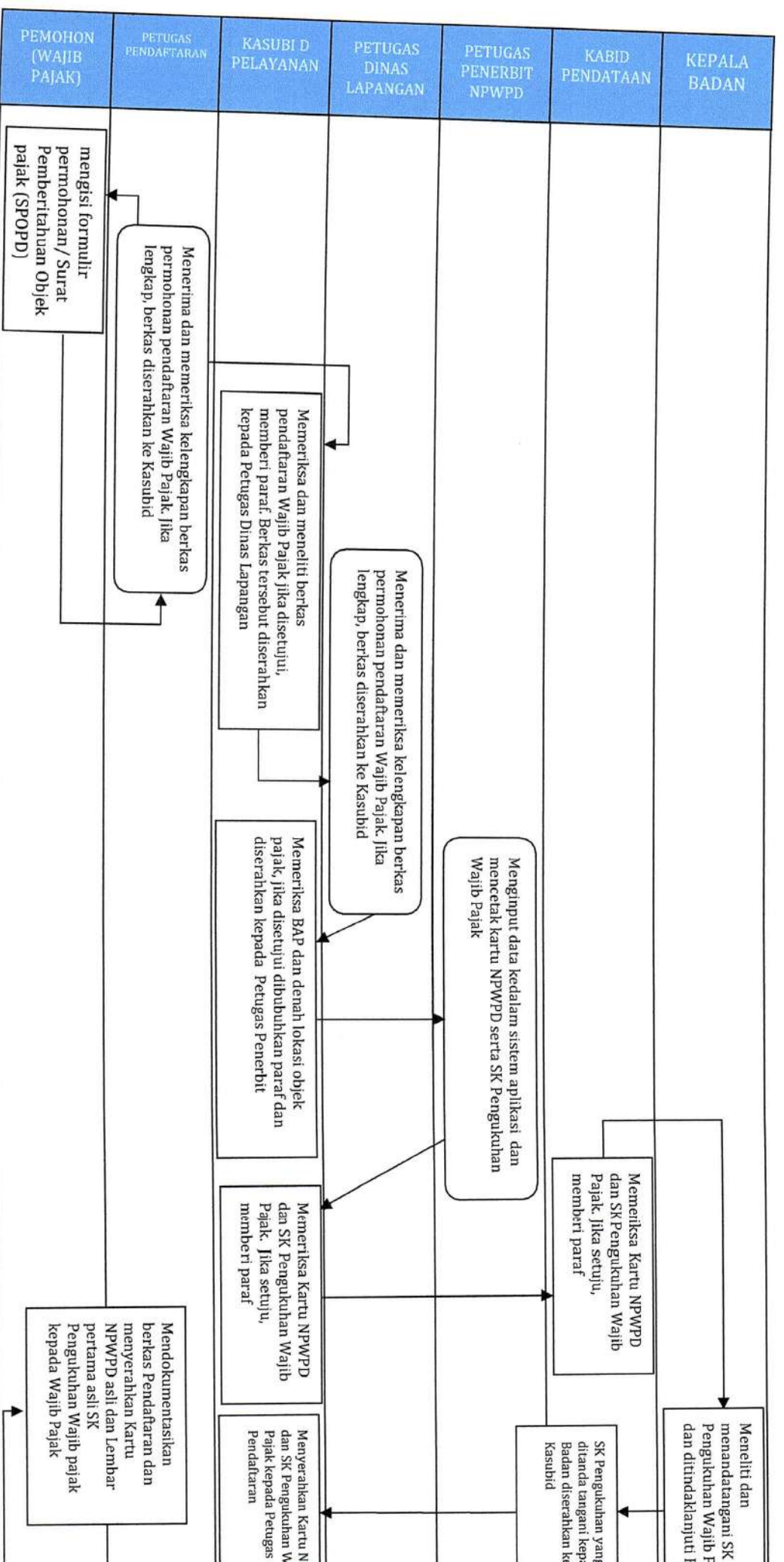
BAPENDA 01.01 CFM 07

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

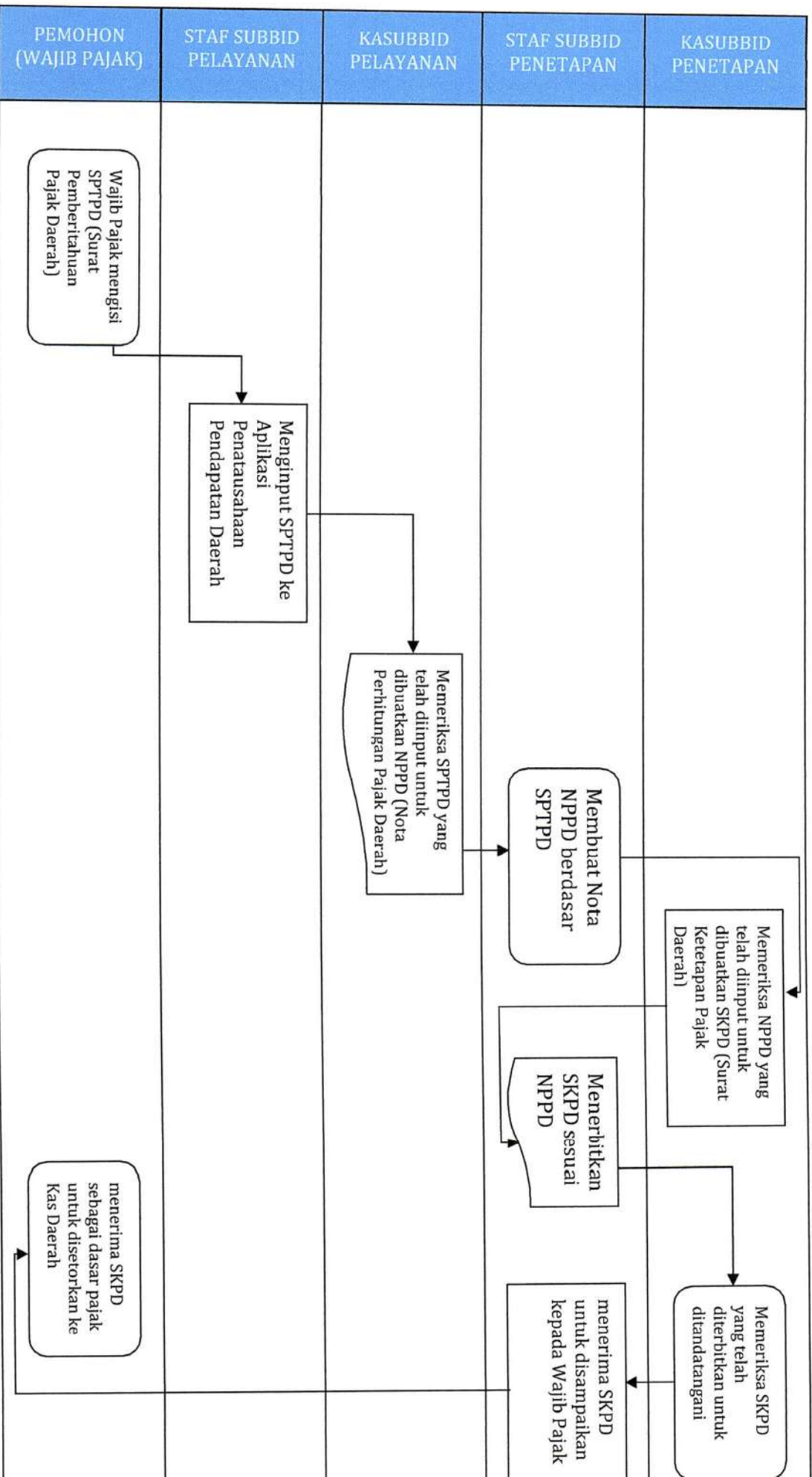


BAPENDA 01.01 CFM 08

PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH

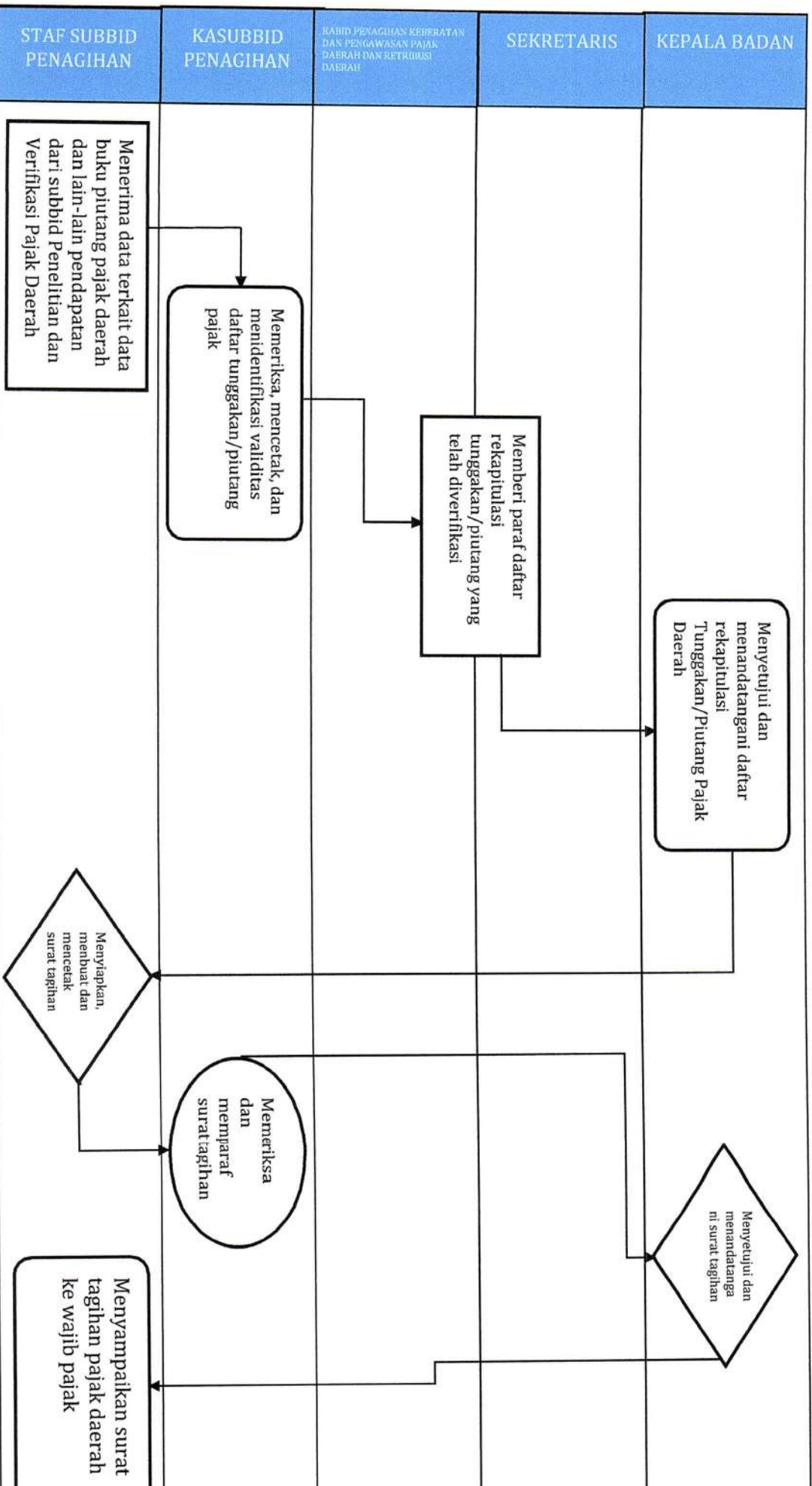


PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH

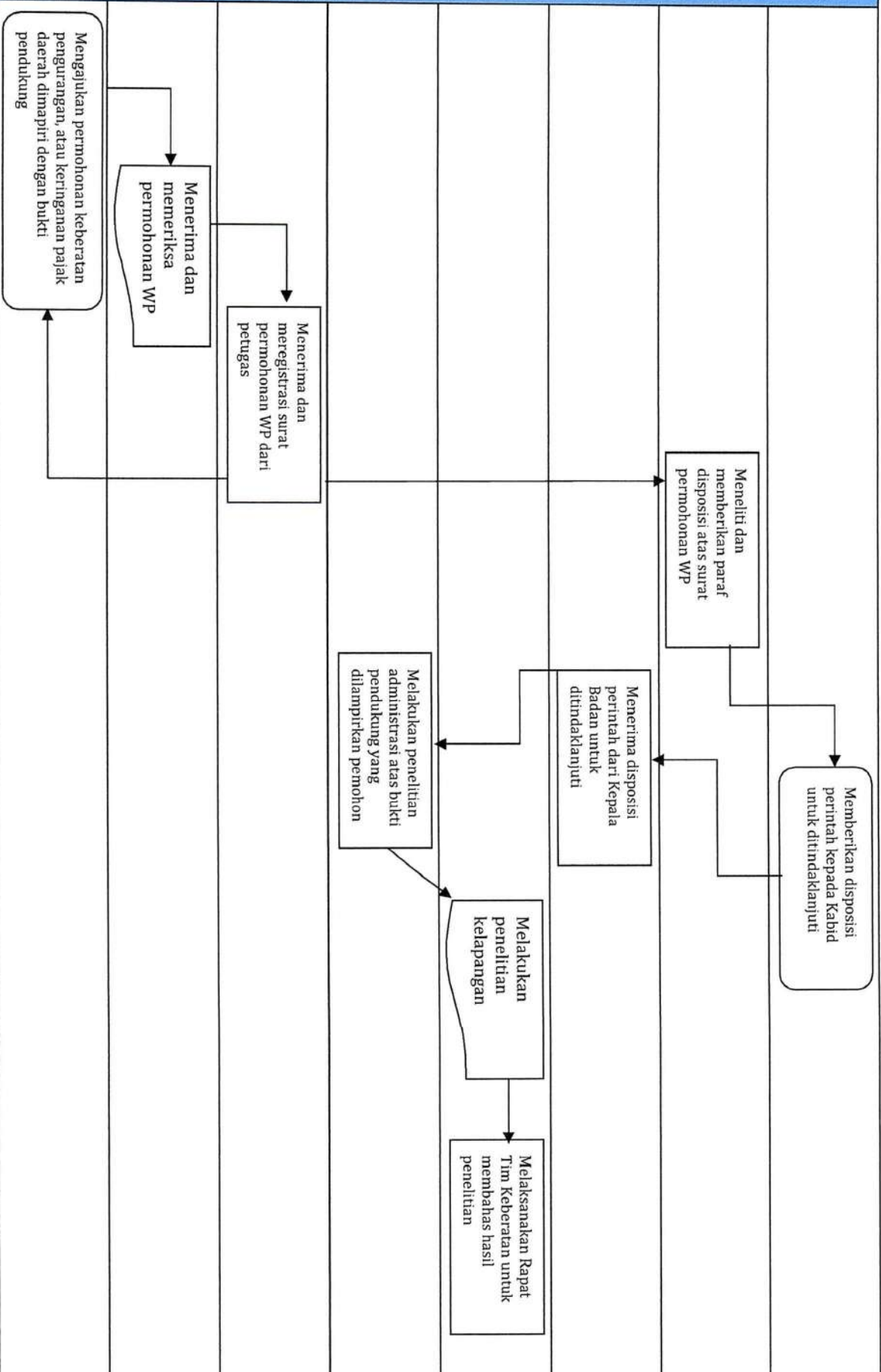


BAPENDA 01.01 CFM 10

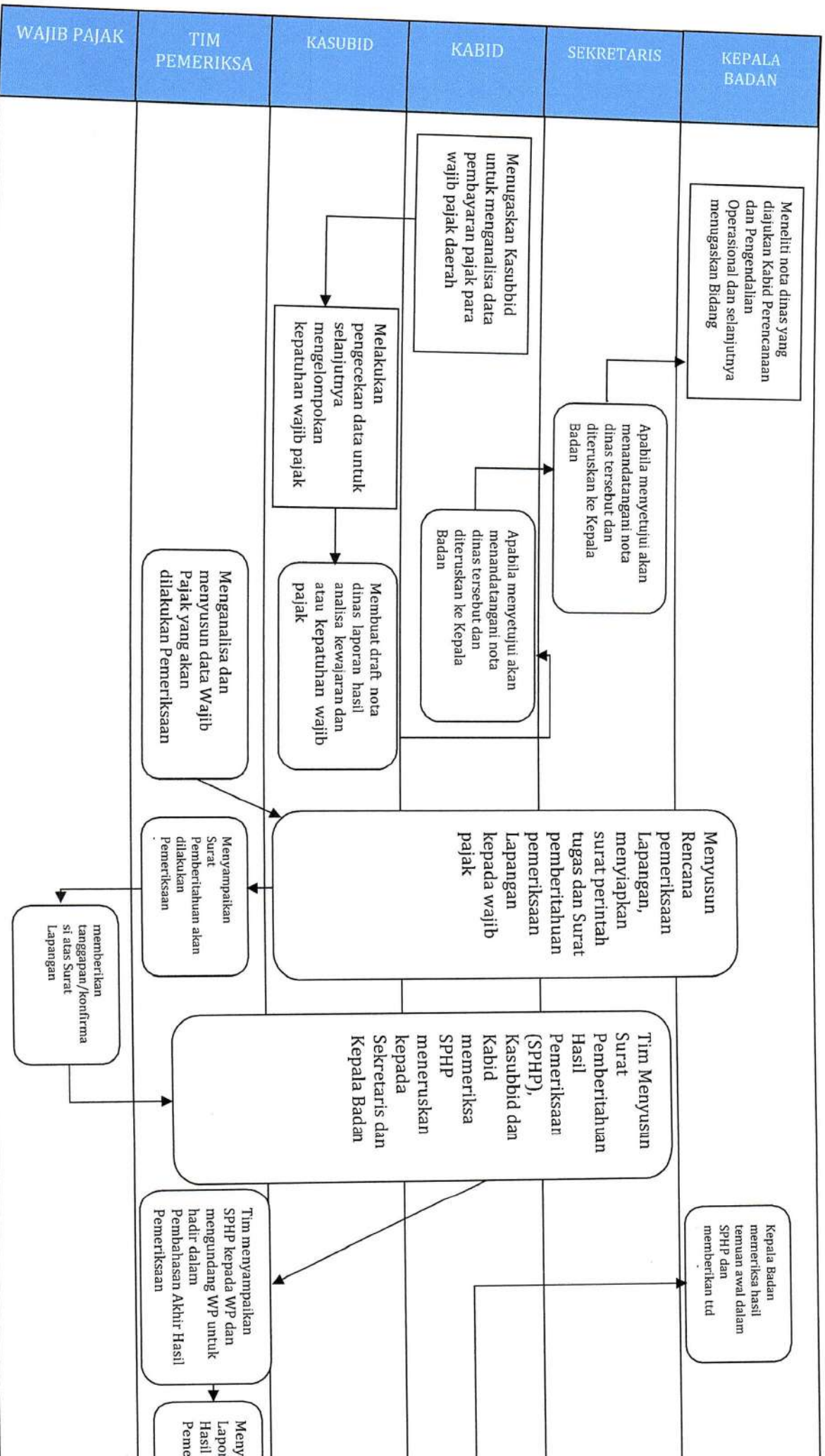
PENAGIHAN PAJAK DAERAH



WAJIB PAJAK	PETUGAS PELAYANAN	KASUBAG UMUM	KASUBBID PENAGIHAN	TIM PEMERIKSA	KABID PENAGIHAN KEBERATAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	SEKRETARIS	KEPALA BADAN
-------------	-------------------	--------------	--------------------	---------------	---	------------	--------------



PENGENDALIAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH



Tana Paser, 13 Nopem
Kepala Badan,



Ali Nour Muhammad, S
NIP. 19730903 20060



LAPORAN PELAKSANAAN

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER**

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PAJAK DAERAH PADA LOKET PELAYANAN PAJAK DAERAH

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.



Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser mengadakan survei ini.

Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik serta Peningkatan pelayanan dengan Visi Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera. Serta Misi Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di BAPENDA Kabupaten Paser, yang diambil dengan kuesioner dilaksanakan pada BAPENDA Kabupaten Paser.

Pelaksanaan survei dan laporan survei yang telah dilaksanakan dan tentu saja masih perlu banyak perbaikan-perbaikan agar lebih baik dalam penulisan kata maupun data yang disajikan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa kami terima sebagai motivasi dalam melaksanakan pembenahan diri memaksimalkan sumber daya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Paser.

Semoga laporan ringkas ini dapat berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran Pegawai Bapenda Kabupaten Paser dan masyarakat pengguna layanan di Loker pelayanan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Paser.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tana Paser, Desember 2023

Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Paser

Ali Nour Muhammad, SP.

MM

Pembina
NIP.197309032006041012

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DARTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B.Tujuan dan Sasaran.....	2
C.Rencana Dan Tahapan Kerja Pelaksanaan.....	3
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN.....	4
A.Metode Survei	4
B.Teknik Pengumpulan Data	4
C.Variabel Pengukuran IKM	4
D.Teknik Analisis Data.....	5
BAB III. PROFIL RESPONDEN.....	7
Umur	7
Jenis Kelamin.....	7
Pendidikan Terakhir	8
Pekerjaan Utama	9
BAB IV. HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (PENGGUNA LAYANAN PAJAK DAERAH)	10
A.Persyaratan	11
B.Prosedur	12
C.Waktu Pelayanan	13
DBiaya/Tarif	14
E.Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.....	15
F.Kompetensi Pelaksana	17
G.Perilaku Pelaksana	18
H.Penanganan Pengaduan ,saran dan masukan.....	19
I. Sarana Prasarana.....	20
J.Hasil Survey Kualitatif	21

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	22
A.Kesimpulan	22
B.Rekomendasi.....	23
RUJUKAN	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Kategori Mutu Pelayanan	6
2.	Responden Menurut Karakteristik Umur	7
3.	Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin.....	7
4.	Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir.....	8
5.	Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama	8
6.	Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	9
7.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Persyaratan	11
8.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Prosedur	12
9.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Waktu Pelayanan	13
10.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Biaya/Tarif	15
11.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Layanan.....	16
12.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana.	17
13.	Kepuasan Masyarakat Perilaku Pelaksana	18
14.	Kepuasan Maklumat Pelayanan.....	19
15.	Kepuasan Masyarakat Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.....	20

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Persyaratan	12
2.	Kepuasan Masyarakat Prosedur	13
3.	Kepuasan Masyarakat waktu Pelayanan	14
4.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup biaya/Tarif.....	15
5.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup Produk Spesifikasi Jenis Layanan.....	16
6.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana.....	17
7.	Kepuasan Masyarakat Ruang Lingkup perilaku Pelaksana	19
8.	Kepuasan Masyarakat Pengguna maklumat Pelayanan.....	20
9.	Kepuasan Masyarakat Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial,

sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Bapenda Kabupaten Paser melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Adapun pelayanan yang dilaksanakan pada loket Badan Pendapatan Daerah kabupaten paser menurut Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 6) Yakni;

1. Pajak Restorasi
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Parkir
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di loket Pelayanan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Paser. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan BAPENDA Kabupaten Paser.

Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di loket Pelayanan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Paser..

Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di loket pelayanan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Paser sehingga dapat mencapai tujuan memberikan kepuasan pelayanan yang diinginkan.

C. Rencana Kerja Dan Tahapan Pelaksanaan

1. Jadwal Kegiatan

Waktu Pelaksanaan : Satu Tahun Anggaran
Kegiatan

No	TAHAPAN	Oktober				November				Desember				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan perencanaan	x												
2	Mengumpulkan Kuesioner		x	x	x									
3	Pengolahan Data				x	x	x							
4	Analisa ,Evaluasi dan pengkajian Pelaporan							x	x					
5	Cetak Laporan									x				

Tabel .1 Jadwal Kegiatan

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan :

No	Tahapan kegiatan	Metode
1.	Persiapan	- Melaksanakan Rapat persiapan - Membuat SK TIM /Pembagian Tugas
2.	Mengumpulkan Kuesioner	- Mengumpulkan Kuesioner
3.	Pengolahan Data	- Penghitungan data kuisoner - Tabulasi Data
4.	Analisa ,Evaluasi dan pengkajian Pelaporan	- Revisi, Konsultasi perbaikan
5.	Cetak Laporan	- Cetak dan Penjilidan Laporan

Tabel. 2 Matrik Tahapan Kegiatan

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Bapenda Kabupaten Paser ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga bulan Desember 2023

3. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM), antara lain:

- Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
- Tim survei membuat instrumen berupa angket, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
- Tim survei melakukan survei sesuai jadwal. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.

- Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data
- Tim survei mengkoding kuesioner, memasukkan jawawan kuesioner dan menganalisis data
- Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Bapenda Kabupaten Paser, antara lain: Pedagang, Mahasiswa, PNS, Wiraswasta, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.

C. Variabel Pengukuran IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut..

9. sarana dan prasarana

Adalah segala fasilitas yang memberikan kemudahan dealam memberikan pelayananan masyarakat,.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Paser ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi

mutu pelayanan di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Paser KHUSUS ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

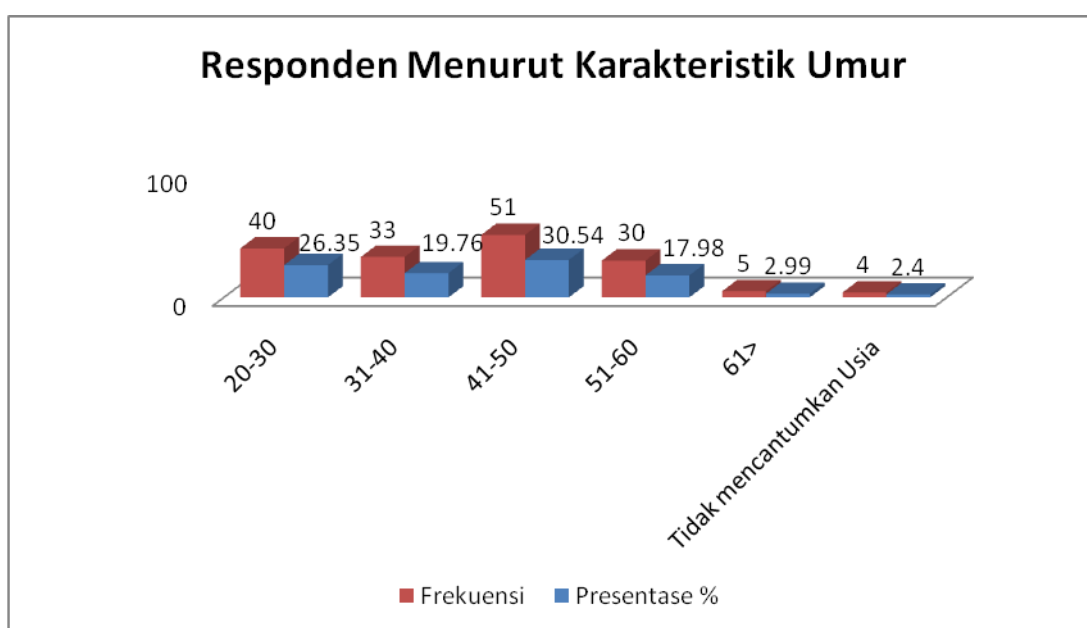
BAB III

PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 4 Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase %
1	20-30	40	26,35
2	31-40	33	19,76
3	41-50	51	30,54
4	51-60	30	17,98
5	61>	5	2,99
6	Tidak mencantumkan Usia	4	2,40
Jumlah		167	100%



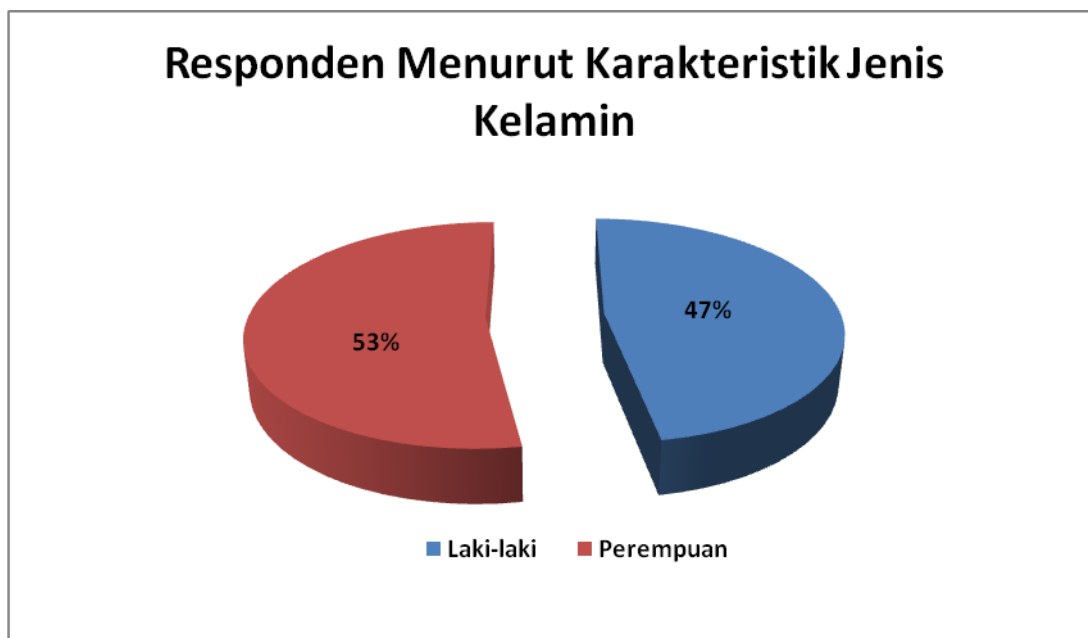
B. Jenis Kelamin

Tabel 5

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase %
1	Laki-laki	79	47.31
2	Perempuan	88	52.69
Jumlah		167	100%

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Perempuan Sebanyak 88 Orang (52,69%) dan laki- laki sebanyak 79 Orang (47,31%)



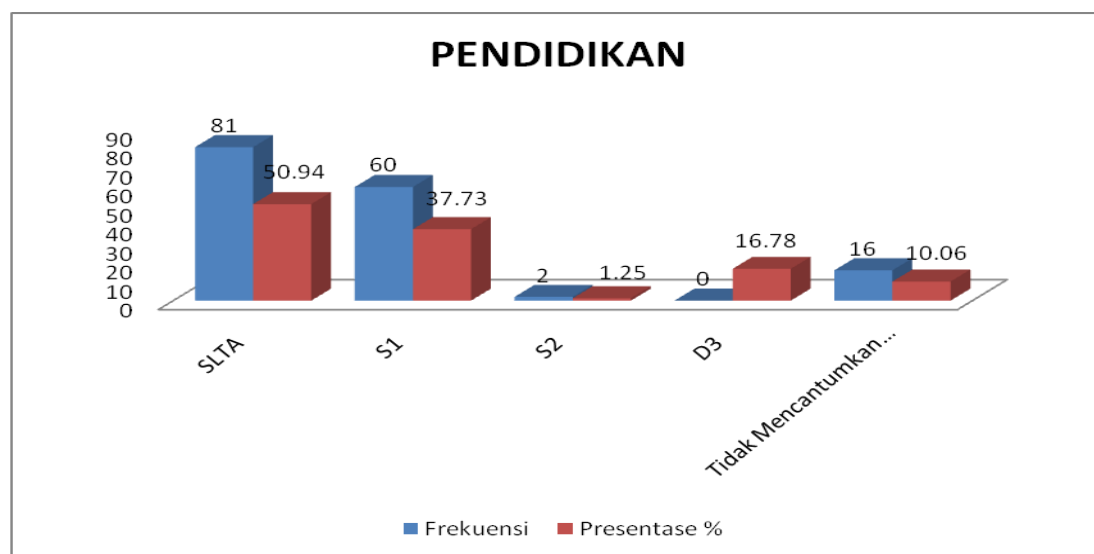
C. Pendidikan Terakhir

Tabel 6

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase %
1	SLTA	81	50,94
2	S1	60	37,73
4	S2	2	1,25
5	D3	-	16,78
6	Tidak Mencantumkan Pendidikan	16	10,06
Jumlah		159	100%

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 81 orang (50,94 %).



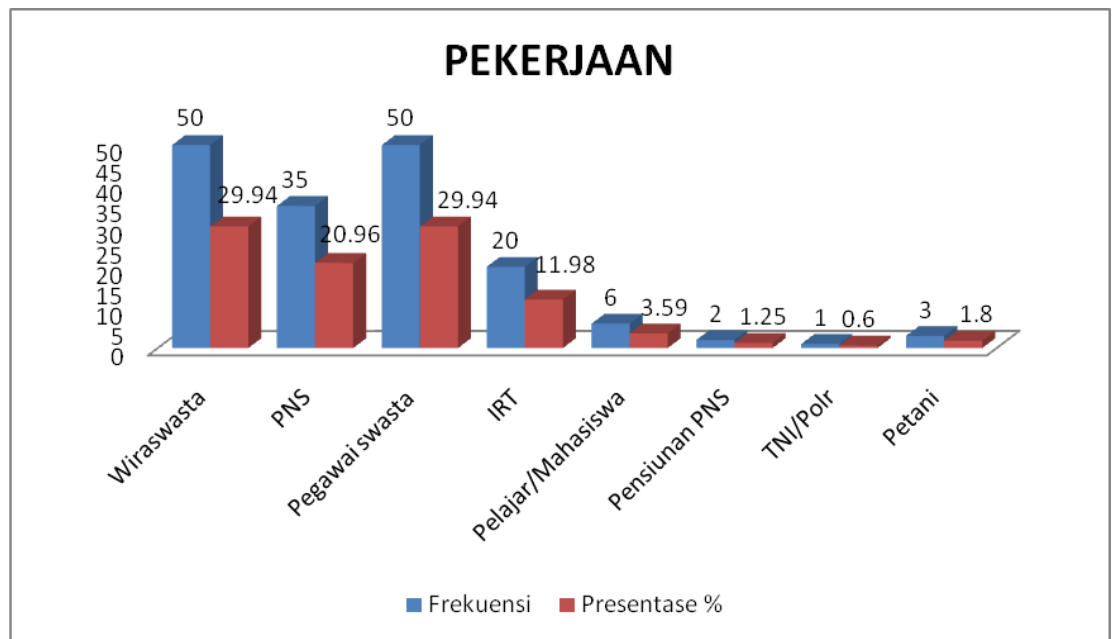
D. Pekerjaan Utama

Tabel 7

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Presentase %
1	Wiraswasta	50	29,94
2	PNS	35	20,96
3	Pegawai swasta	50	29,94
4	IRT	20	11,98
5	Pelajar/Mahasiswa	6	3,59
6	Pensiunan PNS	2	1,25
7	TNI/Polri	1	0,60
8	Petani	3	1,80
	Jumlah	167	100%

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini dengan pekerjaan Wiraswasta sebanyak 50 Orang (29,94 %).



BAB IV

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (PENGGUNA LAYANAN PAJAK DAERAH)

A. Persyaratan

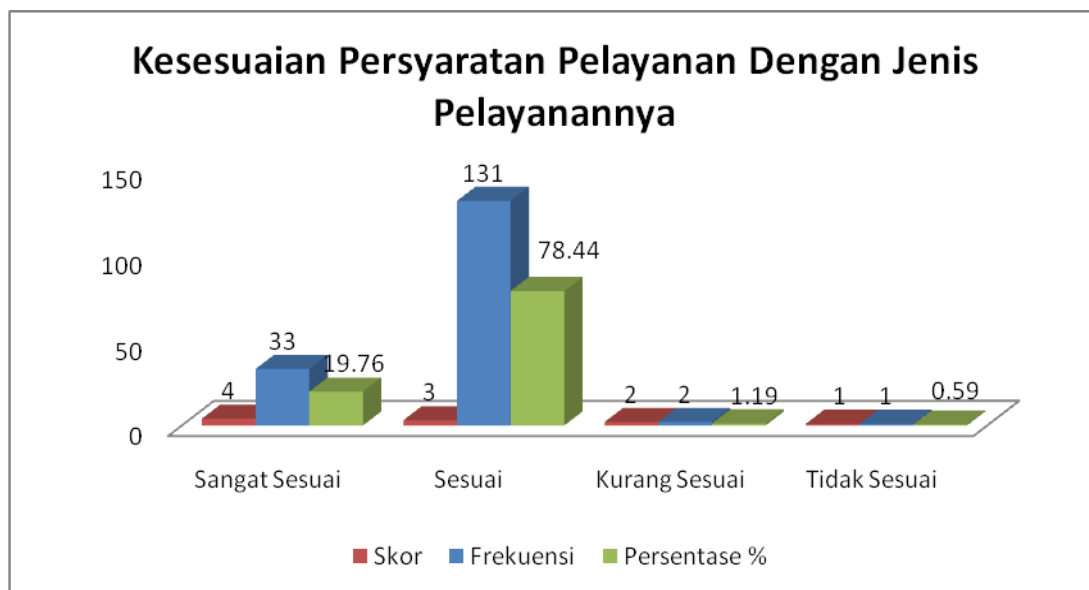
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,17 dengan Skala 1-4 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “ BAIK ”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori Baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak Daerah ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Pernyataan Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Dengan Jenis Pelayanannya.

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Sesuai	4	33	19,76
2.	Sesuai	3	131	78,44
3.	Kurang Sesuai	2	2	1,19
4.	Tidak Sesuai	1	1	0,59
		Jumlah	167	100,0

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,12 dengan Skala 1-4 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “ BAIK Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak ruang lingkup prosedur berada pada kategori baik.

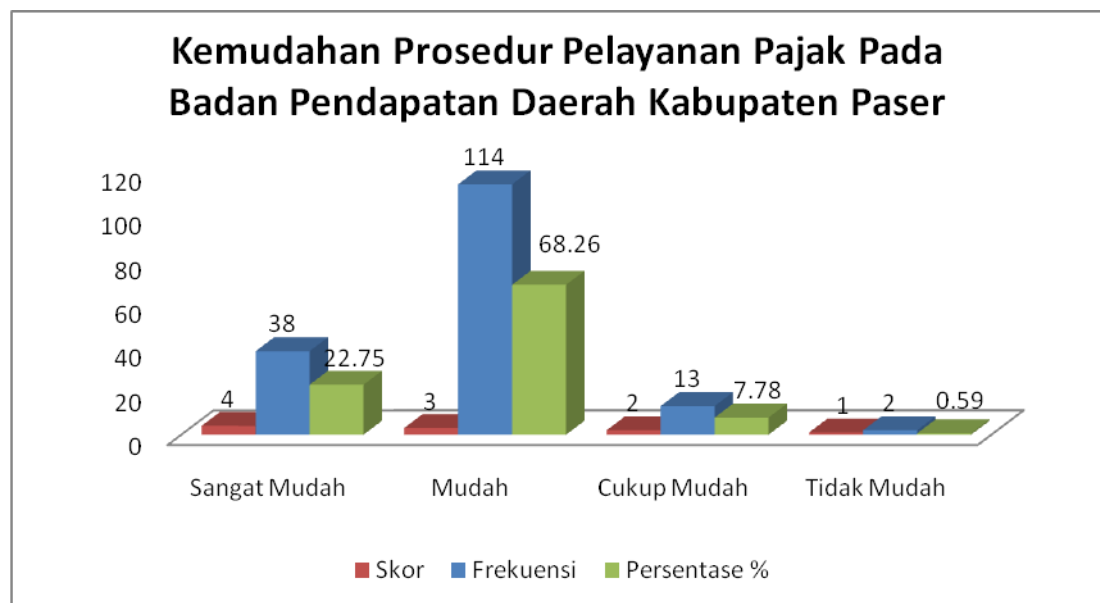
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak daerah, ruang lingkup prosedur disajikan pada table berikut ini.

Tabel 9

Pernyataan Bagaimana Pemahaman Saudara Tentang Kemudahan Prosedur Pelayanan Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Mudah	4	38	22,75
2.	Mudah	3	114	68,26
3.	Cukup Mudah	2	13	7,78
4.	Tidak Mudah	1	2	0,59
		Jumlah	167	100,0

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,00 dengan Skala 1-4 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “ BAIK”. . Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak untuk waktu pelayanan berada pada kategori baik.

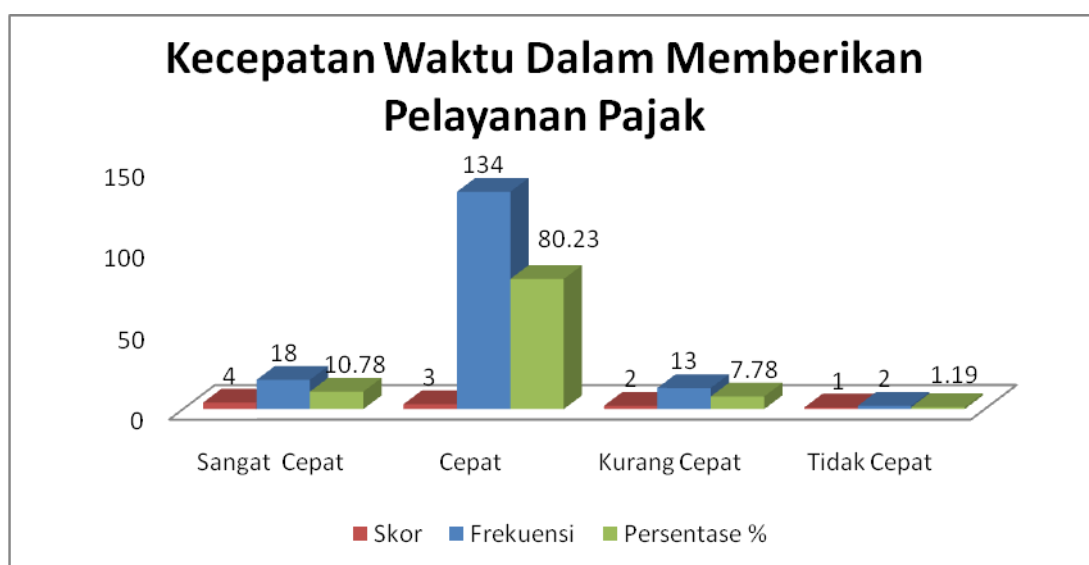
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak daerah, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada table berikut ini.

Tabel 10

Pernyataan Pendapat Saudara Tentang Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan Pajak

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Cepat	4	18	10,78
2.	Cepat	3	134	80,23
3.	Kurang Cepat	2	13	7,78
4.	Tidak Cepat	1	2	1,19
		Jumlah	167	100,0

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



D. Biaya/Tarif

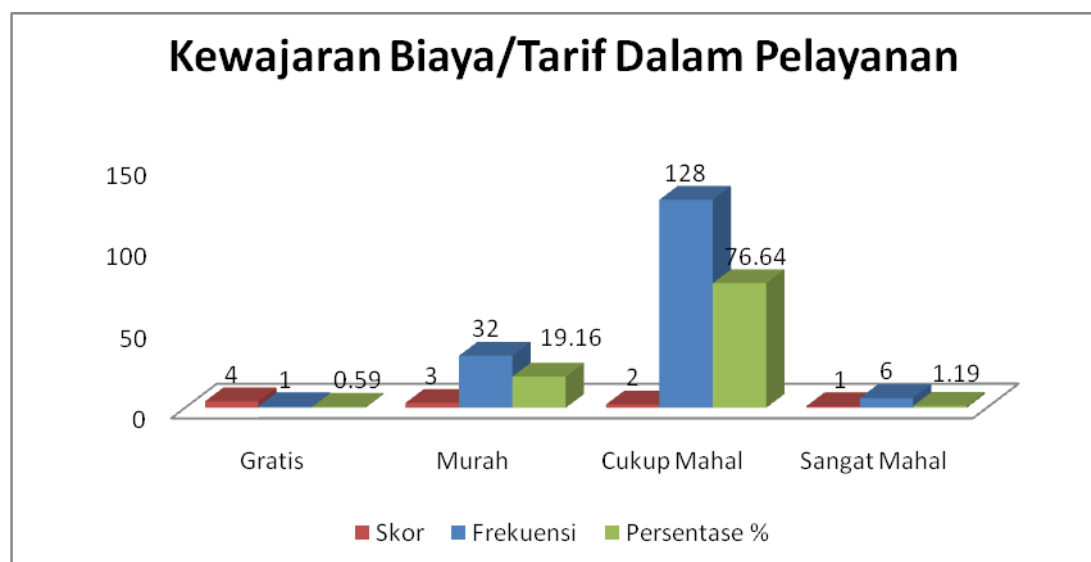
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,14 dengan Skala 1-4 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori " BAIK Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak, ruang lingkup biaya/tariff berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak daerah ruang lingkup biaya/tariff disajikan pada table berikut ini.

Tabel 11
Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kewajaran Biaya/Tarif Dalam
Pelayanan
RuangLingkup: Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Gratis	4	1	0,59
2.	Murah	3	32	19,16
3.	Cukup Mahal	2	128	76,64
4.	Sangat Mahal	1	6	1,19
Jumlah			167	100,0

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

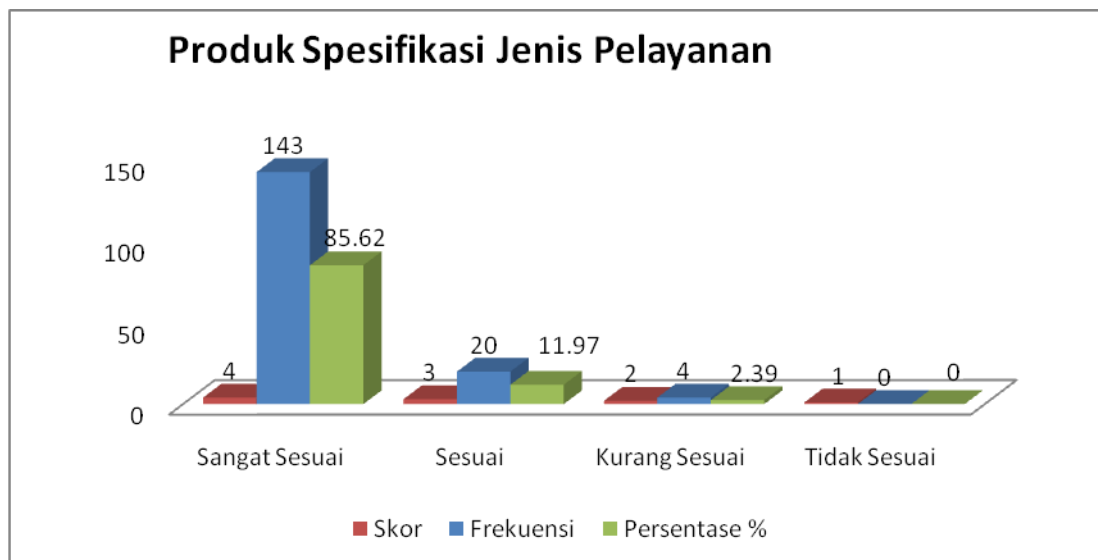
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata korse besar 3,09 dengan Skala 1-4 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “ BAIK “Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada table berikut ini.

Tabel 12
Pernyataan Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kesesuaian Produk Pelayanan Antara Yang Tercantum Dalam Standar Pelayanan Dengan Hasil Yang di Berikan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Sesuai	4	143	85,62
2.	Sesuai	3	20	11,97
3.	Kurang Sesuai	2	4	2,39
4.	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			167	100,0

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan

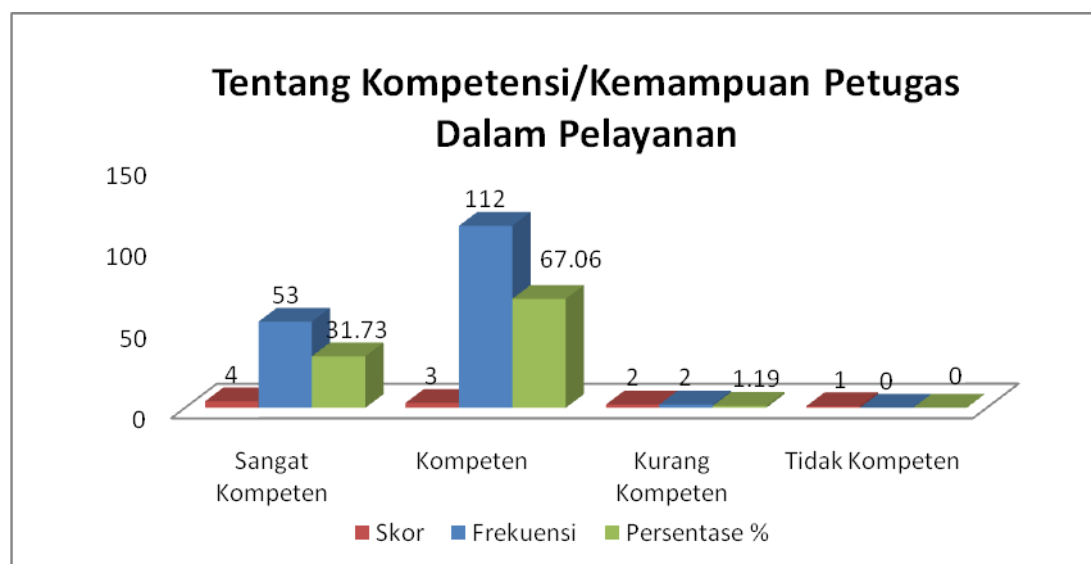
pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh reratas korse besar 3,30 dengan Skala 1-4 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “ SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori Sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak daerah, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada table berikut ini.

Tabel 13
Pernyataan Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Kompeten	4	53	31,73
2.	Kompeten	3	112	67,06
3.	Kurang Kompeten	2	2	1,19
4.	Tidak Kompeten	1	0	0
Jumlah			167	100,0

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh besar 3,25 dengan Skala 1-4 berada

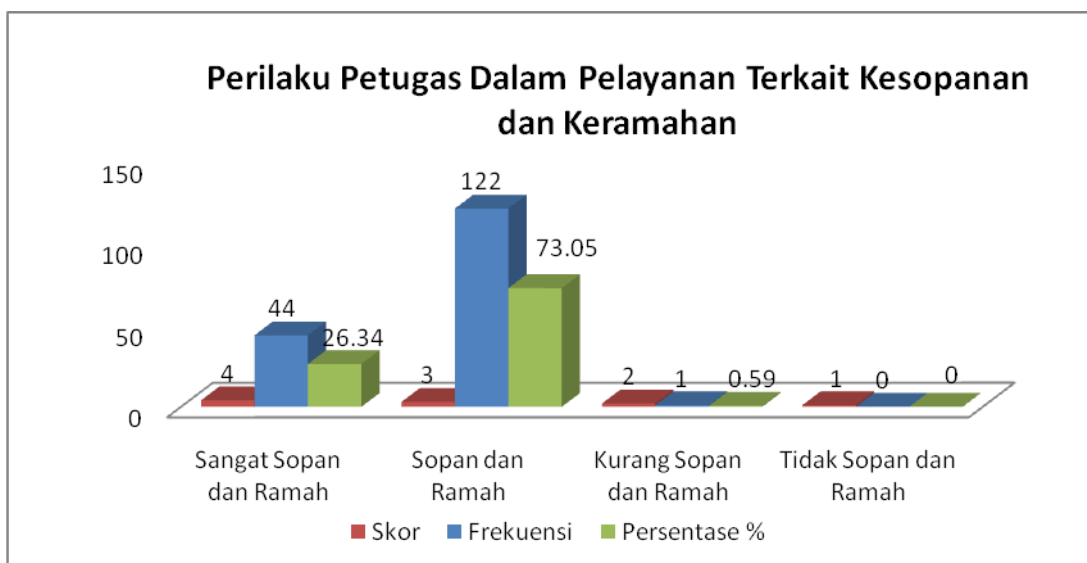
pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak Daerah, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak Daerah, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada table berikutini.

Tabel 14
Pernyataan Bagaimana Pendapat Saudara Perilaku Petugas Dalam Pelayanan Terkait Kesopanan dan Keramahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Sangat Sopan dan Ramah	4	44	26,34
2.	Sopan dan Ramah	3	122	73,05
3.	Kurang Sopan dan Ramah	2	1	0,59
4.	Tidak Sopan dan Ramah	1	0	0
Jumlah			167	100,0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



H. Penanganan Pengaduan ,saran dan masukan

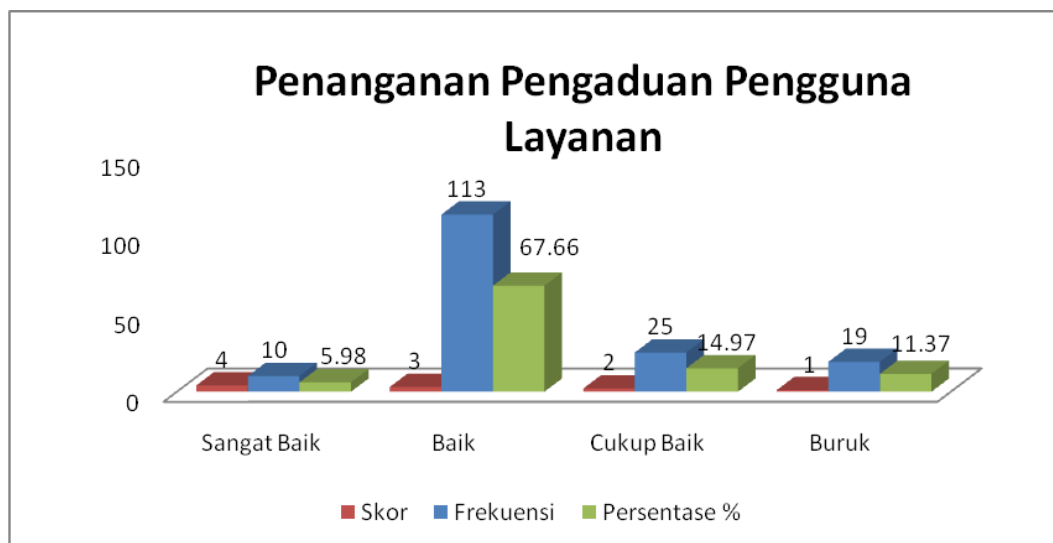
Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan merupakan Kesiapan penyelenggara dalam menerima pengaduan dan memberikan edukasi dan informasi serta layanan jawaban pengaduan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh 3,44 dengan Skala 1-4 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “ SANGAT BAIK”.. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori Sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak Daerah, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada table berikut ini.

Tabel 15
Pernyataan Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Baik	4	10	5,98
2.	Baik	3	113	67,66
3.	Cukup Baik	2	25	14,97
4.	Buruk	1	19	11,37
Jumlah			167	100,0

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



I. Sarana Prasarana

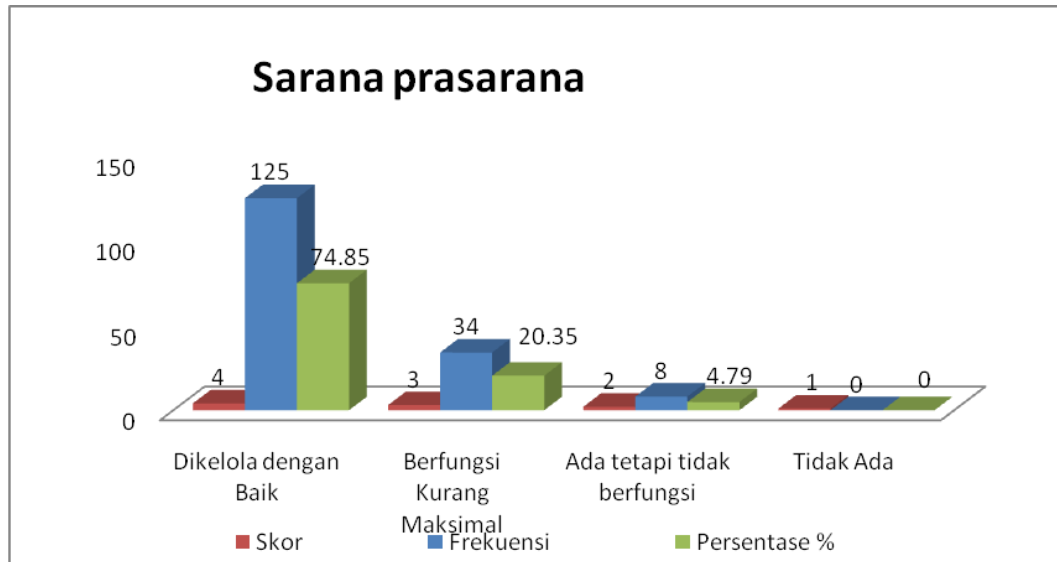
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata 3,15 dengan Skala 1-4 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori "BAIK". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pajak Daerah, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada table berikut ini.

Tabel 16
Pernyataan Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Dikelola dengan Baik	4	125	74,85
2.	Berfungsi Kurang Maksimal	3	34	20,35
3.	Ada tetapi tidak berfungsi	2	8	4,79
4.	Tidak Ada	1	0	0
		Jumlah	167	100,0

Berdasarkan table tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan Pajak Daerah di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser sebesar **78,94** dan berada pada kategori **BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

Tabel 8
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pajak Daerah
di Pelayanan Pajak BAPENDA Kab.Paser

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,174	Baik	4
2.	Prosedur	3,126	Baik	7
3.	Waktu Pelayanan	3,006	baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,144	Baik	6
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,096	Baik	8
6.	Kompetensi Pelaksana	3,305	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,257	Baik	3
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,443	Sangat baik	1
9.	Sarana Prasarana	3,156	Baik	5

Hasil analisis dalam kategori unsur :

1. Persyaratan Pelayanan Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser berada pada kategori BAIK
2. Prosedur Pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser berada pada kategori BAIK
3. Waktu pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori SANGAT BAIK
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori SANGAT BAIK
9. Ketersediaan sarana prasarana Masukan di Pelayanan Pajak daerah di BAPENDA Kabupaten Paser pada kategori BAIK

Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan Pajak Daerah di Pajak Daerah, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup “Penanganan Pengaduan Masukan dan saran.” disusul ruang lingkup “Kompetensi Pelaksana”,

B. Rekomendasi

Secara umum cukup banyak masukan atau rekomendasi yang bila dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Agar kelengkapan sarana Prasarana berupa nomor antrian
2. Adanya Ketersediaan Kotak saran dan Masukan.
3. Adanya Petugas Piket/ Jaga Pada jam Istirahat

4. Adanya petugas khusus yang melayani pengunjung untuk menjawab pertanyaan tentang pengisian form pendaftaran.
5. Perlunya pelatihan peningkatan kualitas pelayanan bagi petugas penerima pelayanan.
6. Masih perlu dilengkapi dengan Baner terkait Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.
7. Ktersediaan Air minum dan tisu.
8. Sudut baca yang menyediakan bacaan berita Update

Standar pelayanan baik teknis maupun administrasi sudah dengan aturan dan saat ini telah tersedia Meja Pelayanan, namun perlu kelengkapan dilengkapi dengan brosur-brosur:

1. Brosur Syarat dan Prosedur Proses Pajak
2. Brosur Sosialisasi Pajak
3. Brosur tentang capaian target Pendapatan
4. Brosur tentang Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset. Yogyakarta.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset Yogyakarta.

LAMPIRAN

- SK TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT]
- INSTRUMEN KUESIONER
- TABULASI DATA
- FOTO KEGIATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat No. 01 Tanah Grogot, Kab. Paser, Kode Pos 76211
Telp. (0543) 23816, FAX (0543) 23816, Website <https://bapenda.paserkab.go.id>
(Email) bapendakab.paser@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR : 130 /Bapenda/X/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KABUPATEN PASER TAHUN 2023**

BUPATI PASER,

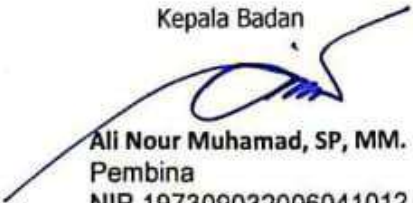
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Paser Tahun 2023 pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Paser;
 - b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten Paser.
- Mengingat :**
1. Undang- undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 3. PeraturanPemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Noomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah KabupatenPaser Tahun Anggaran 2019.
 9. Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023.
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
1. Pengarah
 2. Penanggung jawab
 3. Ketua
 4. Sekretaris
 5. Anggota
 6. Tim Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di TanaPaser
pada tanggal Oktober 2023

Kepala Badan


Ali Nour Muhamad, SP, MM.
Pembina
NIP.197309032006041012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Paser;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Paser di Tana Paser;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR
TANGGAL Oktober 2023

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
KABUPATEN PASER TAHUN 2023 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN PASER

- Pengarah : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
- Penanggung Jawab : Sekretaris Bapenda
- Ketua : 1. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah.
2. Kepala Bidang Perencanaan pengembangan dan sarana prasarana pajak daerah
- Wakil Ketua : Subbidang penetapan wajib pajak daerah pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah.
- Sekretaris : Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pada Bidang P2SP2D
- Anggota : 1. Subbidang penyuluhan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah.
2. Subbidang penilaian PBB-P2 BPHTB
3. Subbidang penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.
4. Subbidang penagihan pajak daerah
- Sekretariat : Subbidang pelayanan dan konsultasi pajak daerah pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah.
- Tim Survei Kepuasan Masyarakat : 1. Anwar Junaidi, W. SE.
2. Sahrul, S.Sos.
3. Hartini, SE.
4. Ade Yohana, H. SE.
5. Ayu Marcela, SP.
6. Zulham Noor

Kepala Badan



Ali Nour Muhamad, SP, MM.
Pembina
NIP.197309032006041012

No :

**KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA UNIT LAYANAN RSUD/ BADAN/ DINAS/ KECAMATAN/ KELURAHAN/ UPT
PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023**

Tanggal Survey :

Jam Survey :

PROFIL RESPONDEN

Jenis kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan	Usia : Tahun
Pendidikan : <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> D1-D4 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> >S2	
Pekerjaan : <input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> TNI/ Polri <input type="checkbox"/> Peg. Swasta <input type="checkbox"/> Wiraswasta <input type="checkbox"/> Pelajar/ Mahasiswa <input type="checkbox"/> Lainnya, (sebutkan)	
Jenis Layanan Yang Diterima:	<input type="checkbox"/> (Sebutkan, misal : KTP, Poli Umum, dll) <input type="checkbox"/> (Sebutkan) <input type="checkbox"/> (Sebutkan) <input type="checkbox"/> (Sebutkan)

A. PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN

(Mohon dipilih salah satu pilihan dengan tanda silang (X) pada angka yang tersedia)

1. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian persyaratan yang harus dipenuhi dengan jenis pelayanan yang anda dapatkan?	1	Tidak Sesuai
	2	Kurang Sesuai
	3	Sesuai
	4	Sangat Sesuai
Jika pilihan Bapak/ Ibu Tidak atau Kurang Sesuai apakah dikarenakan : a) Banyak berkas yang diminta b) Tidak terdapat penjelasan terkait persyaratan c) Tidak transparan		
Harapan atau Keluhan Bapak/ Ibu :		
2. Bagaimana prosedur yang anda lalui untuk mendapatkan pelayanan ?	1	Berbelit, Tidak Mudah
	2	Agak Mudah
	3	Mudah
	4	Sangat Mudah
Jika pilihan Bapak/ Ibu Agak atau Tidak Mudah apakah dikarenakan : a) Prosedur tidak dijelaskan dan alurnya rumit b) Proses yang akan dijalani tidak dijelaskan c) Tidak mudah untuk bisa berkomunikasi dengan petugas		
Harapan atau Keluhan Bapak/ Ibu :		

3. Bagaimana pendapat anda tentang kecepatan waktu dalam pemberian pelayanan ?	1	Tidak Cepat
	2	Kurang Cepat
	3	Cepat
	4	Sangat Cepat
<p>Jika pilihan Bapak/ Ibu Tidak atau Kurang Cepat apakah dikarenakan :</p> <p>a) Antrian lama</p> <p>b) Kedatangan petugas lama atau tidak sesuai jadwal</p> <p>c) Petugas lambat dan kurang merespon pertanyaan masyarakat</p>		
Harapan atau Keluhan Bapak/ Ibu :		
4. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian/ kewajaran biaya yang dibayarkan untuk jenis pelayanan yang anda terima ?	1	Sangat Mahal
	2	Cukup Mahal
	3	Murah
	4	Gratis
<p>Jika pilihan Bapak/ Ibu Cukup atau Sangat Mahal apakah dikarenakan :</p> <p>a) Terdapat biaya tambahan</p> <p>b) Ketidakwaajaran biaya</p> <p>c) Biaya yang tidak ditanggung mahal</p>		
Harapan atau Keluhan Bapak/ Ibu :		
5. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan/ anda terima ?	1	Tidak Sesuai
	2	Kurang Sesuai
	3	Sesuai
	4	Sangat Sesuai
<p>Jika pilihan Bapak/ Ibu Tidak atau Kurang Sesuai apakah dikarenakan :</p> <p>a) Standar Pelayanan tidak dipasang/ dipublikasikan</p> <p>b) Tidak sesuai kelas pelayanan yang diterima</p> <p>c) Tidak transparan</p>		
Harapan atau Keluhan Bapak/ Ibu :		
6. Bagaimana pendapat anda tentang kemampuan/ kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan?	1	Tidak Mampu
	2	Kurang Mampu
	3	Mampu
	4	Sangat Mampu dan Terampil
<p>Jika pilihan Bapak/ Ibu Tidak atau Kurang Mampu apakah dikarenakan :</p> <p>a) Petugas baru perlu didampingi petugas senior</p> <p>b) Masih ada yang tidak terampil (seperti memasang infus, menggunakan komputer, dll)</p> <p>c) Kemampuan petugas tidak merata</p>		
Harapan atau Keluhan Bapak/ Ibu :		

7. Bagaimana pendapat anda dengan tutur kata, sikap, dan perilaku petugas pada saat memberikan pelayanan kepada saudara?	1	Tidak Sopan dan Ramah
	2	Kurang Sopan dan Ramah
	3	Sopan dan Ramah
	4	Sangat Sopan dan Ramah
Jika pilihan Bapak/ Ibu Tidak atau Kurang Ramah apakah dikarenakan : a) Masih ada yang judes, tidak sopan b) Kurang sabar melayani masyarakat c) Kurang senyum dan perhatian		
Harapan atau Keluhan Bapak/ Ibu :		

8. Bagaimana pendapat anda tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ?	1	Tidak Ada
	2	Ada, Tetapi Tidak Berfungsi
	3	Berfungsi Kurang Maksimal
	4	Dikelola Dengan Baik
Jika pilihan Bapak/ Ibu Tidak atau Kurang Berfungsi apakah dikarenakan : a) Tidak tersedia wadah atau media untuk mengadu b) Tidak tahu kemana harus mengadu c) Penanganan atau tindaklanjut pengaduan tidak diinformasikan		
Harapan atau Keluhan Bapak/ Ibu :		

9. Bagaimana pendapat anda tentang kualitas sarana dan prasana pada pelayanan ini?	1	Buruk
	2	Cukup
	3	Baik
	4	Sangat Baik
Jika pilihan Bapak/ Ibu Cukup atau Buruk apakah dikarenakan : a) Ruang tunggu sempit dan kursinya terbatas b) AC tidak ada atau tidak berfungsi/ ruangan panas c) Tempat parkir sempit d) Tempat sampah kurang e) Perlengkapan/ peralatan tidak modern		
Harapan atau Keluhan Bapak/ Ibu :		

Catatan serta masukan lain yang perlu disampaikan terhadap layanan yang diterima:

**PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017**

UNIT PELAYANAN

: BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER

ALAMAT

: JI. BASUKI RAHMAT NO.01 TANA PASER

Tlp/Fax:

;

No	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan	NILAI UNSUR PELAYANAN								
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	45	L	Wiraswata	S1	3	4	4	1	3	3	3	1	3
2	47	L	PNS	S2	4	4	3	4	3	3	3	4	4
3	-	P	Honoror	S1	4	4	4	3	4	4	4	1	3
4	42	P	-	-	4	4	3	4	4	4	3	4	4
5	-	L	Swasta	SMA	4	3	3	4	3	3	3	4	3
6	56	L	Swasta	SD	3	2	3	3	3	3	3	1	3
7	22	L	Swasta	SMA	4	3	4	3	4	4	3	4	4
8	45	L	Swasta	S1	3	3	3	3	4	4	3	2	3
9	26	L	Wiraswata	D1-D4	3	4	3	3	3	4	4	4	4
10	29	L	Swasta	SMA	3	4	3	3	3	4	4	4	3
11	38	L	Lainnya	SMA	4	4	3	3	4	4	4	4	4
12	20	P	Swasta	SMA	3	3	3	3	3	3	4	4	3
13	69	L	Lainnya	SMA	3	3	3	2	3	3	3	4	2
14	32	L	Wiraswata	S1	3	3	3	4	3	3	3	4	3
15	35	P	-	S1	4	3	3	3	3	4	4	4	4
16	44	P	PNS	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
17	36	P	IRT	SMP	3	3	2	3	3	3	3	4	3
18	33	L	PTT	S1	3	3	2	2	3	3	3	4	3
19	48	L	PNS	S1	3	4	3	3	3	3	3	4	3
20	52	L	PNS	S1	3	3	3	3	4	3	3	4	3
21	45	L	Wiraswata	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
22	60	L	Wiraswata	SD	3	3	3	3	3	3	3	1	3
23	35	P	IRT	SMP	3	3	4	3	3	3	3	4	3
24	24	L	Swasta	S1	4	3	3	4	3	4	4	4	3
25	18	L	Pelajar/Mahasiswa	SMA	4	3	3	4	3	4	3	4	3
26	35	L	PNS	D1-D4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
27	30	P	Swasta	SMA	4	4	4	3	4	4	4	4	4
28	30	L	Wiraswata	SMA	3	3	2	4	3	3	3	3	3
29	41	L	Swasta	S1	3	3	4	3	3	4	3	4	4
30	64	L	Lainnya	SMA	2	3	2	3	2	3	3	3	3
31	60	P	Pensiun PNS	S1	1	3	2	2	3	3	3	1	3
32	31	P	PNS	D1-D4	3	3	3	4	3	3	3	4	3

33	40	L	PNS	S1	3	3	3	3	3	3	3	4	3
34	37	L	Honoror	S1	3	3	3	3	3	4	3	4	3
35	60	L	Lainnya	S1	4	4	3	4	3	4	4	4	4
36	48	L	TNI/Polri	SMA	3	4	3	4	3	3	3	4	3
37	32	L	Swasta	SMA	3	1	3	4	3	3	3	4	3
38	-	P	IRT	SMA	3	2	2	3	3	3	3	3	3
39	21	P	Swasta	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
40	59	L	Pensiun	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
41	29	P	wiraswasta	S1	3	2	3	3	3	3	4	4	3
42	19	L	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
43	35	P	PNS	D1-D4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
44	26	P	Wiraswasta	S1	3	3	3	3	3	3	3	4	3
45	31	L	Wiraswasta	SMA	3	3	3	3	3	3	4	4	3
46	50	P	Wiraswasta	SD	3	2	3	3	3	3	3	1	3
47	29	L	Peg.Swasta	D1-D4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
48	35	P	PTT	S1	3	3	3	4	3	3	3	4	3
49	30	L	Wiraswasta	S1	3	3	3	3	3	3	3	4	4
50	31	L	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	29	P	Staf Desa	S1	3	4	3	3	3	4	4	4	3
52	54	L	PNS	S2	3	1	1	3	2	2	3	2	2
53	41	P	Peg.Swasta	S1	3	3	2	2	2	3	3	3	3
54	23	P	Peg.Swasta	S1	3	3	3	3	3	3	3	4	3
55	30	P	Peg.Swasta	S1	3	3	3	4	3	3	3	4	3
56	40	L	Wiraswasta	S1	3	2	4	4	4	4	4	4	4
57	30	L	wiraswasta	D1-D4	3	2	3	3	3	4	3	3	3
58	-	P	Peg.Swasta	SMA	3	2	3	3	3	4	3	3	2
59	49	L	PNS	S1	3	2	3	4	3	4	4	4	3
60	52	P	IRT	SMA	3	2	3	3	3	3	3	4	3
61	54	P	Peg.Swasta	SMP	3	3	3	3	3	3	4	4	4
62	45	L	PNS	SMA	3	4	4	3	3	4	4	4	3
63	42	L	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	3	3	4	3	3	3
64	39	P	wiraswasta	SMA	3	2	3	3	3	3	3	3	3
65	43	L	Peg.Swasta	SMP	3	2	3	3	3	3	3	3	3
66	26	P	Peg.Swasta	S1	4	4	3	3	3	3	4	4	3
67	22	L	PNS	D1-D4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
68	28	P	Peg.Swasta	S1	3	4	3	3	3	4	4	4	4
69	20	L	Barista	SMA	4	3	3	3	3	3	4	4	3
70	24	P	IRT	S1	4	4	3	3	3	4	3	4	3
71	56	P	PNS	S1	4	4	4	4	4	4	2	4	3
72	42	L	PNS	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
73	30	L	Perangkat Desa	SMA	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	27	L	PNS	S1	4	4	4	3	4	3	3	4	3
75	55	P	PNS	S1	3	3	3	2	3	3	3	2	3

115	21	P	Pelajar/Mahasiswa	SMA	3	3	3	3	3	4	3	4	4
116	57	L	Peg.Swasta	SD	3	3	2	3	3	3	3	1	2
117	50	P	Honoror	SMP	4	3	3	2	3	3	3	4	3
118	55	L	PNS	S1	3	4	3	4	3	4	3	4	4
119	52	L	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	3	3	4	3	4	3
120	30	P	Perangkat Desa	SMA	3	4	3	4	3	4	4	4	3
121	40	P	PNS	S1	3	4	4	3	3	3	4	3	4
122	39	L	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	4	3	4	3	4	4
123	34	P	IRT	SMA	3	3	2	3	3	3	3	2	3
124	49	P	PNS	S1	3	3	3	3	3	3	3	2	3
125	69	P	IRT	SMA	3	3	2	3	3	3	3	4	3
126	57	P	PNS	S1	3	3	3	3	3	3	3	2	2
127	23	P	Kantor Desa	SMA	4	4	3	3	3	3	4	4	3
128	27	L	Peg.Swasta	S1	4	4	3	4	3	4	3	4	4
129	33	P	IRT	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
130	27	P	Wiraswasta	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
131	30	P	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	4
132	26	P	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
133	52	L	Buruh	SD	3	2	1	3	3	3	3	2	3
134	40	P	IRT	SMP	3	3	3	3	3	3	3	2	3
135	48	P	IRT	SMP	3	3	3	3	3	3	3	4	3
136	64	L	PNS	SMA	3	3	3	3	3	3	3	2	3
137	39	P	Kontrak	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	29	L	PNS	S1	3	3	3	3	3	3	4	4	4
139	26	P	Honoror	SMA	3	4	3	4	3	4	3	4	3
140	43	L	PNS	S1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
141	31	P	Perangkat Desa	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
142	29	P	Wiraswasta	S1	4	3	3	3	3	3	3	3	3
143	50	L	Petani	SMA	3	3	3	3	3	3	3	2	3
144	25	P	PTT	S1	3	4	4	4	4	4	4	4	4
145	43	P	Peg.Swasta	S1	3	3	3	3	3	3	3	2	3
146	50	P	IRT	SMP	3	3	3	3	3	3	3	2	3
147	29	L	Honoror	S1	4	3	3	3	3	3	3	4	3
148	33	P	Wiraswasta	SMP	3	3	3	3	3	3	3	4	3
149	50	L	Wiraswasta	SMP	3	3	3	3	3	3	3	4	3
150	40	L	wiraswasta	S1	3	4	4	4	4	4	4	4	4
151	36	P	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	3	3	4	4	4	3
152	55	P	IRT	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	4
153	45	L	wiraswasta	SMA	4	4	3	3	3	4	3	4	3
154	43	L	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	3	3	4	3	3	3
155	25	P	Peg.Swasta	S1	4	4	3	3	3	4	4	4	3
156	44	P	Peg.Swasta	D1-D4	4	3	3	3	3	3	4	4	4

157	53	L	wiraswasta	SMA	3	4	3	4	3	4	3	4	3
158	44	L	Peg.Swasta	SMA	3	2	3	3	3	3	3	3	3
159	40	P	PNS	S1	3	3	3	3	3	4	4	4	4
160	35	L	PNS	D1-D4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
161	39	L	wiraswasta	SMA	3	3	2	3	3	3	3	3	3
162	44	P	Peg.Swasta	D1-D4	3	3	3	4	3	4	3	3	3
163	22	P	Pelajar/Mahasiswa	S1	3	3	3	3	4	3	4	2	3
164	52	P	Petani	SD	3	3	3	3	3	3	3	2	3
165	55	L	Peg.Swasta	SMA	3	3	3	3	3	3	3	4	3
166	45	L	Petani	SMP	3	3	3	3	3	3	3	2	3
167	28	P	wiraswasta	S1	3	3	3	3	3	3	3	4	3
SNilai /Unsur					530	522	502	525	517	552	544	575	527
NRR / Unsur					3,174	3,126	3,006	3,144	3,096	3,305	3,257	3,443	3,156
NRR tertbg / unsur					0,349	0,344	0,331	0,346	0,341	0,364	0,358	0,379	0,347
													*)
													3,158
													**) 78,943
IKM Unit pelayanan													

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata = Indeks Kepuasan Masyarakat
- IKM = Jumlah NRR IKM tertimbang
- *) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- **) = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Per Unsur = NRR per unsur x 0,11
- NRR tertimbang per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9	Sarana dan prasarana

IKM UNIT PELAYANAN :**78,94****Mutu Pelayanan :**

- A** (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00
- B** (Baik) : 62,51 - 81,25
- C** (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75





PERSENTASE PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2022-2023

Indikator Sasaran	tahun 2022		tahun 2023		Persentase	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	Rp 170.969.275.185,84	Rp 162.734.601.552,66	Rp 336.970.037.093	Rp 191.951.496.398,93	95,18%	56,96%
Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	Rp 36.717.000.000,00	Rp 37.836.611.347	Rp 97.957.000.000	Rp 66.060.339.438,10	103,05%	67,44%
Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	Rp 11.770.389.000,00	Rp 10.843.759.809	Rp 10.950.974.500	Rp 11.346.411.616	92,13%	103,61%
Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diisahkan	Rp 5.723.822.365,84	Rp 5.723.822.366	Rp 6.291.746.565	Rp 6.291.746.565	100,00%	100,00%
Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	Rp 116.758.063.820,00	Rp 108.330.408.030,93	Rp 222.430.576.028	Rp 108.252.998.780	92,78%	48,67%
Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	78,42%	100%	78,94%	78,42%	78,94%

**TARGET DAN REALISASI PENETAPAN KINERJA BERDASARKAN RKPd PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023**

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	Pagu	REALISASI		CAPAIAN		
									K	RP	K	RP	
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	Rp 409.149.800					
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 27.749.000	1	Rp 26.970.000	100%	97,19%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 224.288.000	1	Rp 223.817.188	100%	99,79%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 74.474.800	1	Rp 74.425.600	100%	99,93%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 82.638.000	1	Rp 82.637.100	100%	100,00%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 13.754.117.494				0,00%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun	Rp 13.375.151.510	1	Rp 10.832.931.555	100%	80,99%
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	Rp 378.965.984	1	Rp 336.016.590	100%	88,67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 1.842.181.230				0,00%					

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	unit	Rp 361.821.750	4	Rp 349.264.915	80%	96,53%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	jenis	Rp 287.214.300	8	Rp 256.054.600	80%	89,15%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	jenis	Rp 312.340.180	15	Rp 284.446.700	75%	91,07%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365	exemplar	Rp 6.600.000	170	Rp 2.550.000	47%	38,64%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	kecamatan	Rp 265.377.000	10	Rp 240.862.714	100%	90,76%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1700	Berkas	Rp 608.828.000	1500	Rp 567.965.453	88%	93,29%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 142.638.040				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35	lembar	Rp 684.000	35	Rp 672.600	100%	98,33%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	Rp 141.954.040	12	Rp 130.172.389	100%	91,70%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 100.610.000				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	Rp 48.000.000	4	Rp 38.973.400	80%	81,19%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	Rp 52.610.000	4	Rp 52.535.000	80%	99,86%

2	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan pendataan potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pengelolaan lain-lain PAD yang sah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				Rp 3.964.855.500				0,00%
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 239.055.000	1	Rp 230.870.729	100%	96,58%
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 189.615.000	1	Rp 189.361.861	100%	99,87%
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10	Kecamatan	Rp 462.867.700	10	Rp 457.120.080	100%	98,76%
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 189.224.200	1	Rp 188.876.343	100%	99,82%
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 252.589.800	1	Rp 251.198.221	100%	99,45%
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	87200 1480	wajib pajak PBB Wajib Pajak BPHTB	Rp 536.523.800	87200 1480	Rp 532.635.100	100%	99,28%
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	87000	wajib Pajak	Rp 276.585.200	96000	Rp 276.576.202	110,3%	100,00%
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 540.519.000	1	Rp 516.088.375	100%	95,48%
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1	Dokumen	Rp 379.804.600	1	Rp 281.454.956	100%	74,11%
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.400.000.000	Rupiah	Rp 370.899.600	1.400.000.000	Rp 365.537.199	100%	98,55%
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27	Kasus	Rp 293.637.600	27	Rp 289.277.433	100%	98,52%
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	Dokumen	Rp 233.534.000	1	Rp 229.257.915	100%	98,17%

Faktor Penghambat

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal

Tana Paser, Maret 2023
Kepala Badan Pendapatan daerah

Faktor pendorong

Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati pemberian reward kepada wajib pajak yang memiliki potensi pajak yang besar

Ali Nour Muhamad. SP,MM
NIP 19730903 200604 1 012

**MATRIK KETERKAITAN ANTARA TUJUAN STRATEGIS ,SASARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA ,CAPAIAN KINERJA ,PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023**

No	Tujuan Strategis	sasaran strategis	IKU	Target	realisasi	Capaian	Program Teknis	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4				8	9	10
1	Meningkatkan pendapatan daerah dari Sektor PAD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah	Persentase tingkat pertumbuhan pajak daerah	Rp 97.957.000.000	Rp 66.060.339.438,10	67,44%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
			Persentase tingkat pertumbuhan retribusi daerah	Rp 10.950.974.500	Rp 11.346.411.616	103,61%			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Persentase pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp 6.291.746.565	Rp 6.291.746.565	100,00%	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
		Persentase pertumbuhan lain-lain PAD yang sah	Rp 222.430.576.028	Rp 108.252.998.780	48,67%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
						Penetapan Wajib Pajak Daerah			
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			
						Penagihan Pajak Daerah			
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			

							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP dari APIP	A	BB		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		
	Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
							Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah							
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72%					
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen					
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja,serta Dokumen SAKIP lainnya
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Melaksanakan Penyusunan Anggaran Kas DPA Tahun 2023 dan mencetak DPA Tahun 2023
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen		25%	50%	25%	Melaksanakan Penyusunan Anggaran Perubahan Pada SIPD
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Membuat Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan juga melakukan pengisian Evaluasi Renja pada aplikasi Sikiper setiap triwulannya
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100%					
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	25%	25%	25%	25%	Mencairkan gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen Pelaksanaan Akutansi	1 Tahun	25%	25%	25%	25%	Membuat Dokumen Pelaksanaan Akutansi
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Administrasi Umum	100%					
1.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	25%	50%		25%	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan kantor
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Gedung Kantor, Alat Tulis Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 Jenis	25%	25%	25%	25%	Menyediakan Alat Tulis Kantor, Perbaikan peralatan, serta kebersihan Gedung Kan
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	25%	25%	25%	25%	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Koran dan Peraturan Perundang-undangan	365 Exemplar	25%	25%	25%	25%	Menyediakan bahan bacaan dan koran
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	30 Koordinasi	25%	25%	25%	25%	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
1.3.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola SKPD	1700 Berkas	25%	25%	25%	25%	Mengarsipkan berkas-berkas yang dikelola SKPD
1.4	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadministrasian umum Berjalan Baik	100%					
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda Pos	60 Lembar	100%				Menyediakan Materai dan benda pos lain agar kegiatan berjalan lancar

1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	25%	25%	25%	25%	Menyediakan Telepon, Air, Listrik dan internet untuk SIPD agar lebih memadai
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berjalan Baik	100%					
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit		50%	50%		Menyediakan dan membayar surat surat perizinan dan STNK untuk mobil dinas/operasional
1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	4 Unit	25%	25%	25%	25%	Memelihara gedung kantor agar pelayanan menjadi lebih baik
II	Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah							
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap APBD	7.7 %					
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Peningkatan PAD	10%					
2.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Melaksanakan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
2.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Menyusun Kebijakan Pajak Daerah berupa Perda tentang Pajak Daerah
2.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi Pajak Daerah	1 Laporan	25%	25%	25%	25%	Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Pajak Daerah
2.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Didata	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Memberikan Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Daerah serta melakukan pendataan subjek dan objek Pajak Daerah
2.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Mengolah dan Memelihara Basis data Pajak Daerah berupa Dokumen Penerimaan Pajak Daerah
2.1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah PBB dan BPHTB yang diverifikasi	1400 WP PBB dan 87000 WP BPHTB	25%	25%	25%	25%	Memberikan Pelayanan dan Verifikasi terhadap Wajib Pajak PBB dan BPHTB
2.1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan	1590 WP	25%	25%	25%	25%	Memberikan Pelayanan Penetapan Pajak Daerah
2.1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Memberikan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
2.1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Meriksa Data Hasil Pajak Daerah
2.1.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah yang diselesaikan	1300000000	25%	25%	25%	25%	Menagih Tunggakan Pajak Daerah yang belum diselesaikan
2.1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	41 Kasus	25%	25%	25%	25%	Memberikan layanan penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
2.1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

